

**ANALISIS TEORI KONSTRUKTIVISME BERBASIS IDENTITAS
TERHADAP PERILAKU TURKI DALAM KASUS *AEGEAN DISPUTE***

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

HANINA BALQIS MUSAYYADAH

22323061

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2026

**ANALISIS TEORI KONSTRUKTIVISME BERBASIS IDENTITAS
TERHADAP PERILAKU TURKI DALAM KASUS *AEGEAN DISPUTE***

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional Fakultas
Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh Derajat

Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

HANINA BALQIS MUSAYYADAH

22323061

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2026

HALAMAN PENGESAHAN
ANALISIS TEORI KONSTRUKTIVISME BERBASIS IDENTITAS
TERHADAP PERILAKU TURKI DALAM KASUS *AEGEAN DISPUTE*

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh derajat
Sarjana S1 Hubungan Internasional



Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia



Ketua Program Studi

Karina
Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

Tanda Tangan

1. Hadza Min Fadhli Robby, S.I.P., M.Sc.
2. Enggar Furi Herdianto, S.I.P., M.A.
3. Alfredha Shinta Putri, S.I.P., M.H.I.

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

20 Mei 2026



Hanina Balqis Musayyadah

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR SINGKATAN	vi
ABSTRAK	vii
BAB I: PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Cakupan penelitian	6
1.5 Tinjauan Pustaka	7
1.6 Kerangka Pemikiran	12
1.7 Argumen Sementara	15
1.8 Metode Penelitian	17
1.8.1 Jenis Penelitian	17
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian	17
1.8.3 Metode Pengumpulan Data	18
1.8.4 Proses Penelitian	18
1.9 Sistematika Pembahasan	19
BAB II: WACANA KONSTRUKSI TURKI TERHADAP LAUT AEGEA	
2.1 <i>Misak-i Milli</i> Sebagai Penanda Kedaulatan Teritorial Turki	20
2.2 <i>Mavi Vatan</i> Sebagai Penguat Kedaulatan Laut Turki	27
BAB III: ANALISIS TEORI KONSTRUKTIVISME BERBASIS IDENTITAS TERHADAP PERILAKU TURKI DALAM <i>AEGEAN DISPUTE</i>	
3.1 Konstruksi Sosial dan Fakta-Fakta Sosial (<i>Social Construction and Social Facts</i>)	37
3.2 Struktur Ideasional dan Struktur Material (<i>Ideational and Material Structure</i>)	42
3.3 Identitas, Kepentingan, dan Logika Aksi (<i>Identity, Interest, and Logic of Action</i>)	46
3.4 Agen, Struktur, dan Praktik (<i>Agents, Structure, and Practice</i>)	49
BAB IV: PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	54
4.2 Rekomendasi	56
DAFTAR PUSTAKA	57

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan <i>Misak-i Milli</i> dengan <i>Mavi Vatan</i>	35
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Klaim <i>Misak-i Milli</i>	22
Gambar 2. Peta Wilayah Turki Hasil Perjanjian Sevres 1920	23
Gambar 3. Peta Wilayah Turki Hasil dari Perjanjian Lausanne	25
Gambar 4. Peta 12 Pulau (<i>On Iki Ada</i>)	26
Gambar 5. Peta Klaim <i>Mavi Vatan</i>	31

DAFTAR SINGKATAN

GASC: Greek Administration of Southern

Cyprus IFRI: Institut Français des Relations

Internationales MHP: Milliyetçi Hareket Partisi

MOU: *Memorandum of Understanding*

SDA: Sumber Daya Alam

TRNC: The Turkish Republic of Northern

Cyprus UE: Uni Eropa

UNCLOS: United Nations Convention Law Of The Sea

UNESCO: United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization

ZEE: Zona Ekonomi Eksklusif

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketegangan maritim antara Turki dan Yunani di Laut Aegea. Ketegangan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh faktor material, melainkan juga oleh faktor identitas, sejarah, dan kepentingan nasional. Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep konstruktivisme berbasis identitas dari Trine Flockhart. Konflik ini merupakan hasil konstruksi sosial yang terbentuk dari interaksi historis, perbedaan interpretasi batas wilayah, serta pertentangan nilai ideologi. Identitas nasional, kepentingan, dan doktrin seperti *Mavi Vatan*, turut membentuk bagaimana Turki bertindak dan membuat keputusan. Struktur ideasional seperti identitas, nasionalisme, dan ideologi termasuk doktrin *Mavi Vatan* dan visi *Türkiye Yüzyılı* berpadu dengan faktor material seperti kekuatan militer, klaim maritim, dan perlombaan energi, membentuk kepentingan bagi Turki. Interaksi antara aktor dan struktur sosial menghasilkan siklus konflik yang berulang, ditandai dengan eskalasi militer, rivalitas yang mengakar, dan menarik keterlibatan pihak ketiga.

Kata-kata kunci: Turki, *Mavi Vatan*, Identitas, Sengketa Aegea.

ABSTRACT

This research is based on maritime tensions between Turkey and Greece in the Aegean Sea. These tensions are influenced not only by material factors but also by identity, history, and national interests. The conceptual framework used in this research is a concept of identity-based constructivism by Trine Flockhart. This conflict is a result of social constructions that formed from historical interactions, different interpretations of territorial boundaries, and clashing ideological values. National identity, interests, and doctrines such as Mavi Vatan also shape how Turkey acts and makes decisions. Ideational structures such as identity, nationalism, and ideology, including Mavi Vatan and Türkiye Yüzyılı vision, combined with material factors such as military power, maritime claims, and the energy race, shape Turkey's interests. The interaction between actors and social structures results in a recurring cycle of conflict, which is accompanied by military escalation, entrenched rivalries, and the involvement of third parties.

Keywords: Turkey, Mavi Vatan, Identity, Aegean Dispute

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Turki merupakan sebuah negara yang terletak di benua Asia dan Eropa. Posisi Turki yang terletak di dua benua itu menjadikan Turki turut berkontribusi dalam aspek politik, sosial, budaya, dan ekonomi baik di Asia maupun Eropa. Turki memiliki letak strategis yang berbatasan dengan Laut Mediterania di bagian barat dan barat daya (Yapp and Dewney 2025). Secara identitas, meskipun Turki merupakan negara sekuler namun Islam menjadi agama mayoritas disana, dimana pengaruh Islam juga mengakar kuat dalam masyarakat Turki.

Laut Aegea merupakan bagian dari Laut Mediterania yang terletak di antara semenanjung Yunani di bagian barat dan Anatolia di bagian timur. Laut Aegea merupakan suatu kawasan dengan berbagai pulau-pulau kecil di dalamnya, dimana hal tersebut menyebabkan kedua negara ini bersitegang selama bertahun-tahun untuk memperebutkan hak milik pulau-pulau tersebut.

Hubungan antara Turki dengan Yunani memang sudah buruk sejak awal. Berbagai konflik tersebut menjadikan Turki dan Yunani berinteraksi bukan sebagai sahabat namun justru menganggap satu sama lain sebagai lawan. Sayangnya, konflik-konflik tersebut sulit menemukan titik terang dan justru memicu berbagai konflik baru di era modern ini (Yoel 2023).

Pada tahun 2019, Turki membuat perjanjian dengan Libya. Perjanjian ini didorong oleh sebuah doktrin yaitu doktrin *Blue Homeland* atau *Mavi Vatan*. Doktrin ini merupakan sebuah pemikiran atau landasan yang menganggap bahwa runtuhnya Kesultanan Ottoman disebabkan karena Turki tidak memiliki angkatan laut yang kuat. Terlebih lagi, hal tersebut bertepatan dengan situasi dimana Yunani dan aliansinya akan membangun pipa melewati wilayah Turki, yaitu pipa EastMed. Pergerakan Turki dapat dikatakan berlandaskan doktrin ini, dimana menurut doktrin ini, wilayah perairan Turki memiliki luas 462.000 km², jauh berbeda dengan luas hak wilayah Turki yang dituangkan dalam Peta Seville menurut Uni Eropa (Candar 2020). Turki menerapkan doktrin *Mavi Vatan* untuk menegaskan kembali klaim wilayahnya.

Perjanjian yang disepakati dengan Libya menjadi salah satu strategi melancarkan doktrin ini, karena perjanjian ini menjadikan Turki mendapat klaim yang lebih besar atas eksplorasi di laut Aegea. Selain itu, hasil dari perjanjian Turki dengan Libya menghasilkan batas yang dapat memotong pipa EastMed sehingga pipa tersebut menjadi tidak berhak melewati Turki. Hal ini kemudian menjadi *trigger* yang menyebabkan ketegangan antara Turki dan Yunani di kawasan Laut Aegea kembali meningkat. Yunani tidak mengakui adanya perjanjian antara Turki dan Libya karena perjanjian tersebut tidak melibatkan Yunani di dalamnya padahal melintasi wilayah milik Yunani, dan juga melanggar aturan dari United Nations Convention Law of the Sea (UNCLOS). Banyak negara di sekitar kawasan Laut Mediterania dan Eropa seperti Mesir, Israel, Siprus, Prancis, Italia, dan bahkan UE sendiri sebagai organisasi regional mendukung Yunani dan turut mengecam tindakan Turki (Dinata, Priadarsini, and Prameswari 2024, 399-400).

Yunani berpendapat bahwa pulau-pulaunya di Laut Aegea memiliki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) masing-masing (Yoel 2023, 43). Jika berpegang pada klaim Yunani, maka negara tersebut berhak untuk mengeksplorasi Laut Aegea sejauh 200 mil. Hal tersebut didukung oleh peraturan yang tertulis dalam UNCLOS Pasal 121 Ayat 3.

“Bebatuan karang yang tidak dapat menopang tempat tinggal manusia atau kehidupan ekonominya sendiri tidak boleh mempunyai Zona Ekonomi Eksklusif atau landas kontinen”.

Pasal tersebut dapat juga didefinisikan apabila pulau-pulau milik Yunani tersebut memiliki aktivitas kehidupan dan ekonomi di dalamnya, maka pulau-pulau tersebut berhak atas ZEE sejauh 200 mil (TEMPO 2020). Turki menentang klaim Yunani karena Turki memahami dari perspektif bahwa untuk mengukur ZEE maka harus ditarik garis dari daratan. Terlebih lagi, Turki juga menentang ZEE milik salah satu pulau lainnya, yaitu Pulau Kastellorizo atas dasar perekonomiannya yang bergantung kepada pulau-pulau yang lebih besar disekitarnya.

Konflik antara Turki dan Yunani di Laut Aegea belum menemukan titik terang hingga di tahun-tahun selanjutnya. Pada tahun 2025, Turki menyerahkan peta perencanaan maritimnya sendiri yang disusun oleh Universitas Ankara kepada United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO). Peta tersebut bertentangan dengan *Maritime Spatial Planning Plan* (MSP) yang ditetapkan oleh Yunani (Falasca 2025). Memasuki pertengahan tahun, Turki mengirimkan kapal survei Piri Reis ke kawasan sengketa. Di saat yang bersamaan, Yunani juga melakukan latihan militer di kawasan tersebut. Menanggapi hal itu, Turki berkali-kali mengirimkan sinyal NAVTEX sebagai peringatan karena bagi Turki wilayah sengketa tersebut harus tetap dalam status demiliterisasi. Hal-hal yang terjadi di tahun 2025 ini kemudian membuat ketegangan antara Turki dan Yunani tidak kunjung reda (Turkish Minute 2025).

Selain melihat dari nilai materialis pulau-pulau yang disengketakan, sudut pandang untuk membahas konflik ini juga akan diletakkan pada perspektif dimensi sosial, norma, dan identitas sejak masa lalu dan memengaruhi bagaimana kedua negara berinteraksi, bertindak, dan mengambil keputusan. Dalam kasus sengketa Turki dan Yunani di Laut Aegea, faktor historis yang membentuk konstruksi sosial antara kedua negara berpengaruh dalam membangun persepsi untuk melihat satu sama lain. Peperangan di masa lalu, perbedaan identitas, kepentingan nasional, beberapa hal tersebut sangat cukup untuk menjadikan konflik sengketa ini bertahan selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis kasus sengketa ini dari sudut pandang lain selain dari melihat faktor materialisnya, seperti melihat dari faktor-faktor seperti perbedaan identitas, sosial, dan norma.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana analisis teori konstruktivisme berbasis identitas terhadap perilaku Turki dalam *Aegean Dispute*?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bagaimana teori konstruktivisme berbasis identitas melalui indikator-indikatornya dapat menjelaskan mengenai perilaku politik Turki dalam *Aegean Dispute*.
2. Mengetahui bagaimana struktur sosial hasil interaksi kedua negara dari masa lalu berdampak pada perilaku politik Turki dalam *Aegean Dispute*.

1.4 Cakupan Penelitian

Penelitian ini didasarkan pada sengketa perbatasan yang terjadi di Laut Aegea antara kedua negara yaitu Turki dan Yunani. Analisis isu dilihat dari perilaku Turki selama berkonflik dengan Yunani di Laut Aegea. Tahun 2019 dipilih sebagai titik awal penelitian untuk menjelaskan *trigger* awal dalam konflik antara Turki dan Yunani di Laut Aegea. Tahun 2025 dipilih sebagai batasan rentang waktu karena di tahun ini konflik masih berlangsung meski terdapat beberapa situasi yang berubah namun tetap relevan pada isu persaingan perebutan kekuasaan batas wilayah dan hak eksplorasi masing-masing pihak di Laut Aegea.

1.5 Tinjauan Pustaka

Pertama, penelitian yang berjudul Persengketaan Laut Mediterania Rivalitas Turki-Yunani dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tahun 2023 yang ditulis oleh Grevildo Austin Yoel, yang menjelaskan tentang analisis terhadap konflik antara Turki dan Yunani di Laut Mediterania dari sudut pandang teori neorealisme oleh Kenneth Neal Waltz. Penelitian ini menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan sejarah. Berdasarkan teori neorealisme yang digunakan, artikel ini berisi beberapa analisis. Sengketa di kawasan Mediterania Timur membuat Turki dan Yunani bertindak untuk mempertahankan kedaulatannya pada kawasan itu.

Jurnal ini memiliki beberapa kelebihan, diantaranya adalah jurnal ini menjelaskan cukup detail mengenai perjanjian Turki-Libya yang tidak sah karena tidak melibatkan Yunani, serta menjelaskan mengenai aturan UNCLOS. Meskipun demikian, dalam jurnal ini ditemukan beberapa kekurangan seperti analisis dari sisi sejarah kurang kuat karena pada bagian pembelaan Yunani hanya didasarkan pada umur peradaban Yunani yang lebih tua dibanding Turki (Yoel 2023).

Kedua, penelitian yang berjudul *The Conflict Between Greece and Turkey in the Mediterranean Sea (International Maritime Law Study)* dalam Jurnal Hukum UNISSULA yang ditulis oleh Edanur Yildiz tahun 2020. Penelitian tersebut fokus pada hukum laut dan melihat konflik dari sudut pandang geopolitik dan ekonomi. Pembahasannya berisi rincian ZEE menurut UNCLOS dan penjelasan mengenai klaim-klaim untuk pulau-pulau kecil di sekitar Turki dan Yunani. Hukum internasional menetapkan bahwa batas maritim di Mediterania Timur harus dilakukan dengan beberapa pertimbangan seperti prinsip-prinsip keadilan, kerja sama, dan persetujuan dari negara-negara yang memiliki garis pantai terpanjang seperti Turki, Mesir, dan Libya.

Kelebihan dari jurnal ini terletak pada penjelasan rinci mengenai definisi ZEE, landasan kontinen, dan garis pangkal menurut UNCLOS sehingga muncul gambaran batas wilayah yang disengketakan dalam konteks sengketa Turki dan Yunani terhadap batas maritim mereka. Di sisi lain, dalam jurnal ini masih terdapat beberapa kekurangan yaitu sudut pandang terlalu dilihat dari sisi Turki dan kurang membahas solusi dari hukum internasional secara mendalam (Yildiz 2020).

Ketiga, penelitian yang berjudul *Reconsidering 'UE Actorness' in Changing Geopolitics of the Eastern Mediterranean Region* dalam jurnal *Insight Turkey* yang ditulis oleh Dilek Latif dan Nusret Sinan Evcan tahun 2022. Pada penelitian ini, para penulis berfokus membahas peran Uni Eropa (UE) di kawasan Mediterania melalui teori *actorness* dari Charlotte Bretherton dan John Vogler, yang mana kawasan Mediterania adalah wilayah dengan banyak konflik yang tidak kunjung usai. Dinamika politik, ekonomi, dan kerja sama di kawasan Mediterania Timur mulai berubah di akhir tahun 2000-an ketika ditemukan endapan hidrokarbon. UE mendukung proyek-proyek energi baik secara finansial dan politik, salah satunya adalah proyek pipa East Med sebagai pipa terpanjang yang nantinya akan menjadi jalur gas dari Israel menuju Italia melalui Siprus dan Yunani.

Jurnal ini memiliki beberapa kelebihan, dimana jurnal ini menjadi penting karena dapat menjadi acuan dalam melihat peran UE di konflik Turki dan Yunani di Laut Mediterania. Namun, jurnal ini juga memiliki kekurangan karena ditulis dari sudut pandang UE, sehingga kurang memperlihatkan sudut pandang lain seperti Turki yang seolah dilihat sebagai rival bagi kubu Yunani yang dibela oleh UE (Latif and Evcan 2022).

Keempat, penelitian yang berjudul *Greece and Turkey: Unfriendly Allies* yang ditulis oleh Andrew Mango dalam jurnal Royal Institute of International Affairs tahun 1987. Penelitian ini menggunakan sudut pandang realisme. Alur penulisan dimulai dari masa lalu ketika Turki masih berbentuk kesultanan. Turki dan Yunani sering terlibat sengketa kepulauan. Seperti halnya setelah Perang Dunia II, dimana Italia memberikan Kepulauan *Dodecanese* kepada Yunani yang membuat Turki merasa keseimbangan keamanannya terganggu. Selain itu, di tahun 1955, terjadi konflik ketika Turki menolak ide Yunani yang ingin mengakui Siprus.

Jurnal ini memiliki kelebihan dalam menjelaskan urut dari sejarah masa lalu secara mendalam. Di sisi lain, karena jurnal ini dirilis sebelum tahun 1990-an, maka tidak membahas isu-isu terkini, namun tetap memberikan pengetahuan yang terstruktur mengenai garis waktu konflik antara Turki dan Yunani (Mango 1987).

Kelima, jurnal yang berjudul Analisis Kebijakan Turki dalam MoU Delimitasi Batas Maritim dengan Libya Tahun 2019, yang ditulis oleh Made Mustika Sastra Dinata, Ni Wayan Rainy Priadarsini, dan Anak Agung Ayu Intan Prameswari tahun 2024 dalam Jurnal Diskusi Ilmiah Komunitas Hubungan Internasional. Tulisan ini menggunakan konsep determinan kebijakan luar negeri dan perjanjian bilateral. Tulisan ini membahas perjanjian Turki dengan Libya di tahun 2019, yang mana perjanjian ini dianggap kontroversial karena melanggar hukum laut dengan mengabaikan ZEE milik Yunani.

Jurnal ini juga menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi kebijakan Turki. Tulisan ini memiliki beberapa kelebihan dimana hubungan sebab akibat antara kebijakan Turki, MoU, dan dampaknya di kawasan Mediterania dijelaskan secara rinci dan terstruktur. Di sisi lain, pada tulisan ini masih terdapat kekurangan yaitu penulis belum mengeksplor lebih dalam mengenai dampak dari MoU ini terhadap stabilitas regional (Dinata, Priadarsini, and Prameswari 2024).

Berdasarkan pemaparan dari kelima jurnal penelitian sebelumnya, diketahui bahwa konflik antara Turki dan Yunani di Laut Mediterania telah dikaji menggunakan pendekatan neorealisme, geopolitik, hukum laut internasional, sudut pandang historis, dan konsep determinan kebijakan luar negeri. Selain itu, faktor eksternal seperti Uni Eropa telah dianalisis sebagai aktor yang berpengaruh dalam dinamika kawasan dan konflik.

Meskipun demikian, masih belum terdapat penelitian yang secara khusus menganalisis perilaku Turki dalam konflik di Laut Aegea yang didasarkan dari segi identitas, dalam rentang waktu tahun 2019 hingga 2025 melalui perspektif konstruktivisme berbasis identitas. Oleh karena itu, penelitian ini dapat mengisi kekosongan dan menjadi pelengkap dengan menggunakan perspektif konstruktivisme berbasis identitas, yang nantinya hal tersebut dapat menjadi unsur kebaruan tersendiri dalam penelitian dengan topik serupa.

1.6 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menggunakan konsep konstruktivisme berbasis identitas oleh Trine Flockhart dalam *book chapter* yang berjudul *Constructivism and Foreign Policy* pada buku *Foreign Policy: Theories, Actors, Cases* Tahun 2008 yang disunting oleh Tim Dunne. Konsep yang ditulis oleh Trine Flockhart tersebut merupakan pengembangan dari pemikiran Alexander Wendt mengenai identitas dan kepentingan dalam hubungan internasional. Menurut Trine Flockhart, terdapat empat indikator dalam konsep ini yaitu pertama, *Social Construction and Social Facts*, kedua adalah *Ideational and Material Structure*, ketiga adalah *Identity, Interest, and 'Logics of Action'*, dan keempat adalah *Agents, Structure, and Practice* (Flockhart 2008, 80-90).

Konstruktivisme berbasis identitas berargumen tentang pentingnya peran konstruksi sosial dalam memaknai sebuah realita. Pertama, *Social Construction and Social Facts*. Secara umum, aliran konstruktivisme juga disebut sebagai *social constructivism* karena adanya pandangan akan pentingnya proses sosial dalam sebuah interaksi untuk membentuk nilai-nilai atau pemahaman bersama mengenai dunia. *Social facts* adalah ketika suatu realita memiliki makna yang didapatkan dari persetujuan antar aktor, sehingga hal tersebut menjadi hasil dari interaksi sosial aktor. Konsep tentang dunia internasional merupakan sebuah *social facts*, dimana seiring berjalannya waktu, *social facts* diwujudkan melalui hubungan sosial, aturan-aturan, dan tindakan (Flockhart 2008, 82).

Selain nilai *social facts*, dalam memahami entitas di dunia, terdapat nilai lain yaitu *brute facts* yang merupakan suatu hal atau benda yang keberadaan konkritnya tidak lagi diperdebatkan. Meskipun demikian, makna dari hal tersebut tetap bergantung dengan siapa yang melihatnya. *Brute facts* relevan dengan konsep *culture of anarchy* karena pandangan makna yang berbeda akan mengarahkan kepada tujuan, kepentingan, interaksi, dan tindakan yang berbeda pula pada setiap aktor (Flockhart 2008, 83).

Kedua, *Ideational and Material Structure*. Konstruktivisme juga berasumsi bahwa faktor material dan ideasional memegang peran penting dalam pembentukan makna akan realita dunia. Pada indikator ini dijelaskan bahwa struktur sosial tidak bisa dipahami jika hanya melalui hal-hal yang bersifat materialis seperti militer atau Sumber Daya Alam (SDA). Nilai-nilai bersama mengenai faktor-faktor material, aturan-aturan, simbol-simbol, dan bahasa, merupakan hal yang sangat penting dimana hal tersebut membentuk bagaimana aktor memandang dunia dan aksi dari aktor lain. Tidak ada aksi ataupun kekuatan materialis yang bisa diartikan diluar bentuk nilai-nilai bersama, karena nilai-nilai bersama itulah yang akan bergabung dengan kekuatan materialis dan membentuk aksi yang dilakukan oleh aktor. Dalam indikator ini juga ditekankan bahwa meskipun struktur sosial memang sebagian besar terdiri dari unsur materialis, namun unsur materialis tersebut juga tidak memiliki arti jika dilihat tanpa sudut pandang pemahaman konteks sosial, nilai-nilai bersama, dan tindakan aktor (Flockhart 2008, 84-85).

Ketiga, yaitu *Identity, Interests, and 'Logic of Action'*. Dalam kerangka konstruktivisme, pemahaman terhadap perilaku aktor tidak dapat dilepaskan dari identitas aktor dan juga kepentingannya. Identitas yang dimaksud dalam indikator ini adalah bagaimana suatu aktor memahami dirinya, posisinya dalam interaksi sosial, dan hubungannya dengan aktor lain. Dalam indikator ini, tindakan aktor dipengaruhi oleh identitasnya, dimana identitas juga dibentuk dan didukung oleh faktor sejarah, budaya, politik, dan konteks sosial. Identitas berpengaruh terhadap bagaimana aktor tersebut akan bertindak dan berkepentingan. Kehadiran identitas dalam suatu aktor berfungsi untuk mengarahkan aktor dalam bertindak mengikuti norma yang sesuai dengan identitasnya, sehingga hal tersebut dianggap bahwa aktor akan melakukan tindakan yang lebih pantas dibandingkan tindakan lain. Teori konstruktivisme menolak pemahaman bahwa kepentingan suatu aktor hanya dipengaruhi oleh perhitungan rasional terhadap biaya dan keuntungan, melainkan aktor juga akan mempertimbangkan pilihan lain untuk bertindak sesuai dengan identitasnya. Tindakan aktor dijelaskan dalam nilai *logics of appropriateness* dari *logics of action*. Aktor politik hadir sebagai pengikut dari aturan yang ada, dimana aktor akan mengikuti aturan yang dianggap sesuai dengan identitas tertentu atau yang sesuai dengan identitasnya, meski pada akhirnya tetap akan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang terjadi (Flockhart 2008, 85-86).

Keempat, yaitu *Agents, Structure, and Practice*. Bagi teori konstruktivisme, agen dan struktur dilihat dan dipercayai sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Pada indikator ini, dijelaskan bahwa

agen atau aktor dan struktur merupakan unsur yang saling membentuk dan memengaruhi. Struktur memengaruhi tindakan aktor, tetapi aktor juga bisa mengubah dan memengaruhi struktur melalui aksi-aksi yang dilakukan aktor. Sehingga apa yang terjadi dalam suatu interaksi sosial antar aktor merupakan sebuah siklus antara tindakan dan struktur yang saling memengaruhi (Flockhart 2008, 86-90).

1.7 Argumen Sementara

Berdasarkan konsep *Constructivism and Foreign Policy* dari Trine Flockhart, perilaku Turki dalam *Aegean Dispute* ini dipengaruhi oleh berbagai faktor. Perspektif konstruktivisme menunjukkan bahwa identitas, nilai, ideologi, serta konstruksi sosial yang terbentuk melalui interaksi kedua negara memiliki pengaruh terhadap cara Turki memahami kepentingan dan bertindak dalam konflik.

Pertama, berdasarkan indikator *Social Construction and Social Facts*, konflik antara Turki dan Yunani di Laut Aegea bukan semata-mata sebagai permasalahan batas wilayah atau Sumber Daya Alam (SDA). Permasalahan antara kedua negara ini merupakan hasil dari konstruksi sosial dari interaksi mereka sejak di masa lalu. Menurut nilai *social facts*, batas wilayah yang diterapkan pada peta merupakan hasil dari kesepakatan negara-negara dalam Uni Eropa sebagai sekelompok aktor. Di sisi lain, Turki muncul sebagai aktor yang tidak sepakat dengan pandangan terhadap batas wilayah karena Turki memiliki landasan pandangannya sendiri berdasar keyakinannya, sehingga hal tersebut yang

membuat kedua negara ini berseteru. Jika dilihat dari nilai *brute facts*, pulau-pulau dan batas wilayah yang disengketakan menjadi sebuah objek yang memiliki makna yang berbeda, bergantung dari aktor mana yang melihatnya. Perbedaan pandangan tersebut yang menyebabkan Turki dan Yunani berkonflik karena keduanya melihat dari sudut pandang masing-masing.

Kedua, berdasarkan indikator *Ideational and Material Structure*. Nilai-nilai ideologi dan nasionalisme yang dimiliki Turki bertentangan dengan Yunani. Ideologi dan landasan keyakinan Turki menjadikan negara ini bertindak cukup agresif di kawasan Laut Aegea, dan hal tersebut yang kemudian memicu eskalasi konflik dengan Yunani. Tindakan Turki juga dipengaruhi oleh konstruksi sosial yang terbentuk antara Turki dan Yunani dari masa lalu, dimana pada akhirnya interaksi antara keduanya lebih dimaknai sebagai ancaman dan permusuhan dibandingkan sebagai aliansi kerjasama.

Ketiga, berdasarkan indikator *Identity, Interests, and Logic of Action*. Identitas nasional yang dimiliki Turki menjadi landasan bagi tindakan negara tersebut. Turki bertindak melalui ide *Misak-i Mili* yang kemudian berkembang menjadi doktrin *Mavi Vatan*, dimana doktrin ini yang memengaruhi pandangan dan menjadi landasan perspektif Turki dalam mengukur batas wilayah dan klaimnya terhadap pulau-pulau di Laut Aegea.

Keempat, berdasarkan indikator *Agents, Structure, and Practice*. Struktur sosial dan aktor dalam konflik di Laut Aegea saling membentuk satu sama lain, serta dipengaruhi dan memengaruhi tindakan aktor. Struktur sosial yang ada dapat dilihat dari adanya UNCLOS, dimana sepatutnya UNCLOS dapat memengaruhi bagaimana aktor bertindak. Meskipun demikian, posisi Turki sebagai negara yang tidak meratifikasi UNCLOS juga berpengaruh pada kekuatan UNCLOS dalam memengaruhi tindakan Turki. Tindakan militer dan segala hal yang dilakukan oleh Turki dan Yunani ketika berkonflik juga dapat memengaruhi struktur yang telah ada.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini masuk dalam jenis penelitian kualitatif yang berfokus pada penelitian terhadap fenomena dan perspektif melalui data-data berbentuk teks.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, Turki berperan sebagai subjek penelitian. Untuk bagian objek, konflik Turki dan Yunani di Laut Aegea menjadi objek spesifik dalam penelitian ini.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur, dimana peneliti akan mengumpulkan data dari jurnal, artikel, maupun penelitian-penelitian terdahulu yang diakses melalui media cetak maupun digital. Metode ini dipilih untuk dapat mengupas teori dan studi kasus secara lebih mendalam.

1.8.4 Proses Penelitian

1. Identifikasi Topik

Memilih topik mengenai analisis teori konstruktivisme berbasis identitas terhadap perilaku Turki dalam *Aegean Dispute*.

2. Studi Pustaka

Melakukan studi terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang dipilih untuk mendapatkan *novelty*.

3. Desain Penelitian

Memilih metode kualitatif dengan metode studi kasus sebagai desain atau model dari penelitian yang akan dilakukan.

4. Pengumpulan Data

Penulis mengumpulkan data menggunakan metode studi literatur untuk mengetahui sudut pandang dari jurnal, artikel, dan penelitian-penelitian terdahulu.

5. Analisis Data

Penulis menganalisis data yang telah dikumpulkan dengan metode kualitatif.

6. Penulisan Laporan Penelitian

Data yang telah dianalisis akan ditulis menjadi sebuah laporan yang terstruktur. Diawali dengan pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, analisis data, dan di akhir akan ditarik sebuah kesimpulan.

1.9 Sistematika Pembahasan

Dalam menjawab penelitian ini, maka laporan penelitian akan dibagi dalam beberapa bab. Bab I akan menjelaskan pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab II akan membahas secara mendalam tentang landasan identitas Turki yang mendasari perilaku negara dalam konflik dengan Yunani di Laut Aegea. Bab III dalam penelitian ini akan membahas hasil analisis mengenai perilaku Turki dan Yunani ketika berkonflik di Laut Aegea menggunakan indikator-indikator dari teori konstruktivisme berbasis identitas, dimana seluruh indikator yang berkaitan akan digunakan seluruhnya. Penelitian akan ditutup pada bab IV yang akan berisi kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan.

BAB 2

WACANA KONSTRUKSI TURKI TERHADAP LAUT AEGEA

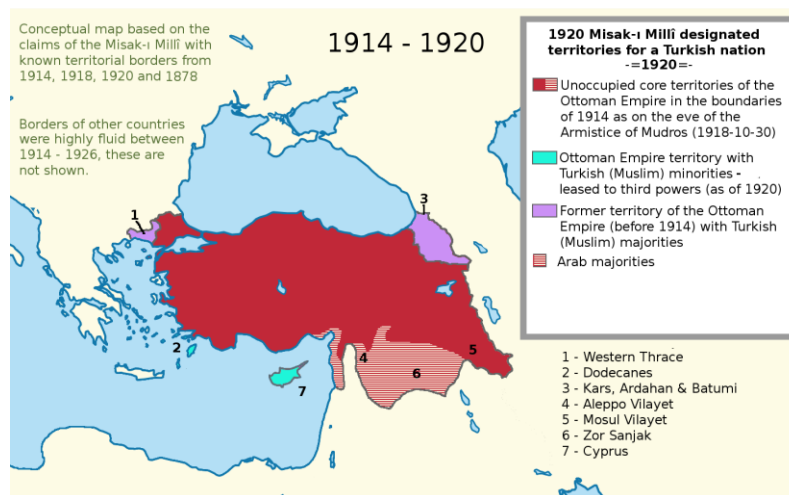
Sengketa antara Turki dan Yunani di Laut Aegea dalam memperebutkan pulau-pulau kecilnya memang terjadi di masa modern, namun faktor sejarah yang terjadi di masa lalu juga memiliki peran besar terhadap interaksi di antara keduanya terutama dalam bagaimana Turki bertindak. Landasan negara yang dimiliki oleh Turki menjadi legitimasi bagaimana Turki mengklaim pulau-pulau di Laut Aegea. Hal tersebut menjadikan dasar dari konflik ini sangat dipengaruhi oleh faktor sosial non-materialis hasil dari bagaimana peristiwa-peristiwa di masa lalu membentuk landasan Turki dalam bertindak.

2.1 *Misak-i Milli* Sebagai Penanda Kedaulatan Teritorial Turki

Misak-i Milli, secara bahasa Turki berasal dari dua kata yaitu *Misak* yang bermakna janji atau sumpah, dan *Milli* yang berarti kebangsaan. *Misak-i Milli* adalah sebuah konsep nasional yang diadopsi oleh para nasionalis pemerintah Turki dari deputy terakhir Kesultanan Ottoman, sebagai landasan yang menunjukkan tujuan gerakan nasionalis Turki. Setelah disahkan, konsep *Misak-i Milli* menjadi landasan dalam membangun Turki modern dibawah kepemimpinan Mustafa Kemal Pasa.

Batas nasional tersebut meliputi Aleppo, Mosul, dan Kirkuk yang merupakan perbatasan dengan Irak dan Suriah, serta juga wilayah Izmir, Istanbul, Ankara, Bursa, Denizli, Konya, Samsun, Kayseri, Mersin, Adana, Antep, Erbil, Erzurum, Diyarbakir, Van, Mosul, dan Kirkuk (Kodal 2025). Hal tersebut bermakna bahwa tanah-tanah Utsmaniyah harus dipertahankan untuk mewujudkan integritas geografis Turki, serta homogenitas penduduk muslim Turki juga ditekankan untuk membentuk adanya integritas demografis.

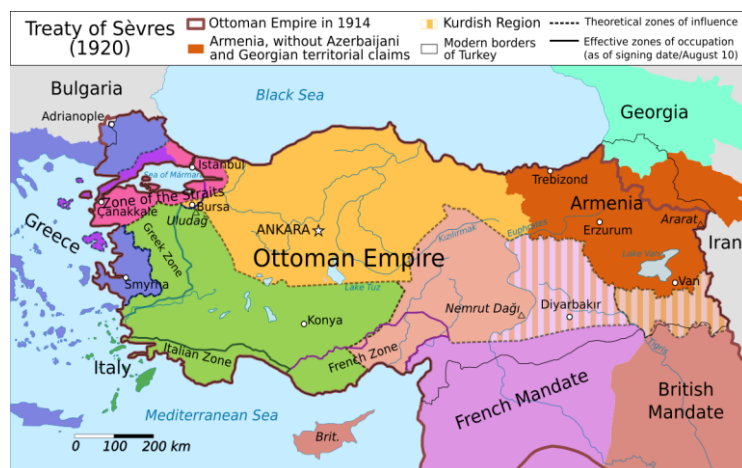
Gambar 1. Peta Klaim *Misak-i Milli*



Sumber: (Wikipedia 2008)

Memasuki tahun 1920, Perjanjian Sevres benar-benar mengubah Turki menjadi sebuah negara kecil dengan hanya menyisakan Turki sebatas Istanbul dan Anatolia di bagian tengah dan Utara. Izmir, Edirne, dan Adrianopel yang diberikan kepada Yunani, kemudian bekas kekuasaan Kesultanan Ottoman di Irak, serta Palestina, dan Yordania dikuasai oleh Inggris. Selain itu, wilayah Suriah, Lebanon, dan Anatolia Selatan yang sebelumnya berada di bawah pemerintahan Kesultanan Ottoman beralih menjadi milik Prancis. Dua belas pulau yang disebut *dedocanese islands* atau *On Iki Ada*, yang terletak di sekitar Turki tetap dikuasai oleh Italia. Armenia melepaskan diri menjadi sebuah republik yang merdeka (Inonu Vakfi, n.d.).

Gambar 2. Peta Wilayah Turki Hasil Perjanjian Sevres 1920



Sumber: (Wikipedia 2019)

Tahun 1923, Turki menghadiri forum Perjanjian Lausanne dengan mengirim İsmet İnönü sebagai delegasi. İsmet İnönü membawa beberapa mandat dengan *Misak-i Milli* sebagai landasan. Pertama, Turki tetap mempertahankan integritas demografis, historis, dan geografis atas wilayah yang diklaim dalam *Misak-i Milli*. Kedua, Turki meminta adanya pengakuan atas batas-batas nasionalnya. Ketiga, penolakan terhadap berdirinya negara Kurdistan di Anatolia (United World International 2020).

Tujuan Turki dalam Perjanjian Lausanne tidak sepenuhnya berhasil, namun juga tidak dapat dikatakan gagal. Dalam Perjanjian Lausanne, Republik Turki pada akhirnya mendapatkan pengakuan atas kedaulatan penuh dengan batasan yang hampir sesuai seperti yang dikehendaki dalam *Misak-i Milli*. Meskipun demikian, beberapa wilayah yang pada awalnya masuk dalam klaim *Misak-i Milli* seperti Mosul, Siprus, dan sebagian Suriah tidak diberikan kepada Turki. Hal tersebut menjadikan Turki yang ada setelah Perjanjian Lausanne memiliki wilayah yang lebih kecil dibandingkan dengan Turki yang diimajinasikan dalam *Misak-i Milli* (Bekdul 2016).

Gambar 3. Peta Wilayah Turki Hasil dari Perjanjian Lausanne



Sumber: (Dizgi 2021)

Setelah ditetapkan wilayah kedaulatan Turki pada Perjanjian Lausanne tahun 1923, Turki sejatinya kehilangan gugus pulau *dedocanese* atau *On İki Ada* dan Siprus. *On İki Ada* pada awalnya berada di bawah kedaulatan Italia, dan kemudian pada akhirnya justru diberikan kepada Yunani.

Gambar 4. Peta 12 Pulau (*On İki Ada*)



Sumber: (Furian 2021)

Di masa modern, *Misak-i Milli* sering dipakai untuk menguatkan klaim Turki atas wilayah-wilayah di dekat pesisir Anatolia dan Siprus, dimana klaim tersebut dilandaskan pada sisi historis. Selain itu, pada era kepemimpinan Presiden Recep Tayyip Erdogan, Turki banyak mempertanyakan batas wilayah hasil dari Perjanjian Lausanne. Ditambah dengan Partai Nasionalis Turki atau Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) yang mendorong Presiden Erdogan untuk bertindak mengklaim wilayah-wilayah yang menurut Perjanjian Lausanne adalah wilayah Yunani.

Menurut Devlet Bahçeli selaku pemimpin MHP, garis pertahanan Turki harus dimulai dari batas-batas yang ada dalam *Misak-i Milli*. Gambaran Devlet Bahçeli akan batasan nasional Turki menurut *Misak-i Milli* terpampang pada peta yang diberikan oleh Ahmet Yiğit Yıldırım, ketua Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan Grey Wolves. Peta tersebut menunjukkan pulau-pulau Yunani di Laut Aegea dan Laut Mediterania diselimuti lukisan bendera Turki. Hal tersebut berarti memperjelas keinginan Turki akan klaim bahwa pulau-pulau tersebut seharusnya berada di bawah kepemilikan Turki (Ghazanchyan 2022).

Selain itu, dikatakan pula oleh salah seorang petinggi angkatan laut Turki, Laksamana Cihat Yaycı, bahwa *Misak-i Milli* pada masa itu hanya sebuah pakta kedaulatan daratan Turki yang diputuskan di tahun 1920. Sayangnya, kedaulatan dari teritorial laut Turki juga turut diputuskan bersamaan dengan disahkannya kedaulatan daratan Turki (TRT Haber 2021). Hal tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa hilangnya kedaulatan maritim seolah menjadi harga yang harus di bayar pada saat itu untuk kedaulatan daratan Turki.

Misak-i Milli kemudian menjadi landasan terbentuknya konsep *Mavi Vatan* (Gürdeniz 2025). *Mavi Vatan* diposisikan sebagai kelanjutan dari *misak-i milli* di masa kontemporer, dan disebut juga sebagai ‘*denizlerdeki Misak-ı Millî*’ atau *Misak-i Milli* di lautan karena pada fokus *mavi vatan* adalah untuk menyatakan klaim teritorial Turki di laut. Hal tersebut berarti bahwa klaim *mavi vatan* sejauh 462.000 km² adalah batas minimal maritim yang harus dipertahankan oleh Turki, seperti

halnya ketika Turki mempertahankan batas minimal daratan pada *Misak-i Milli* (GÜRDENİZ 2021). Pada akhirnya, *Misak-i Milli* banyak digunakan untuk landasan historis Turki terhadap klaim-klaimnya di wilayah Laut Aegea.

2.2 *Mavi Vatan* Sebagai Penguat Kedaulatan Laut Turki

Mavi Vatan, menurut bahasa Turki dapat diartikan sebagai *Mavi* yang artinya biru dan *Vatan* yang berarti tanah air. Dalam skala masyarakat internasional, *Mavi Vatan* lebih dikenal sebagai *Blue Homeland*. Secara sederhana, *Mavi Vatan* merupakan konsep yang diterapkan oleh angkatan laut Turki di bawah kepemimpinan Laksamana Cem Gurdeniz pada tahun 2006 untuk memaksimalkan klaim Turki di Laut Hitam, Laut Aegea, dan Laut Mediterania sejauh 462.000 km².

Mavi Vatan juga dapat dikatakan sebagai betuk Neo-Ottomanisme maritim yang bertujuan untuk mengembalikan kejayaan maritim Turki seperti pada masa Kesultanan Ottoman (Nursan et al. 2025, 128). Sebagai sebuah konsep, *Mavi Vatan* hadir sebagai klaim Turki yang mencakup seluruh yurisdiksi maritim Turki, baik yang telah dideklarasikan maupun yang tidak dideklarasikan. *Mavi Vatan* adalah perluasan kedaulatan strategis Turki atas air asin dan air tawar yang terletak antara 25°-45° bujur timur dan 33°-43° lintang utara (Gürdeniz 2025).

Mavi Vatan menolak klaim Yunani atas *On Iki Ada* dan juga definisi mengenai ZEE sekaligus landas kontinennya. Jika dilihat dari sudut pandang *Mavi Vatan*, penolakan tersebut disebabkan karena ZEE dan landas kontinen dari *On Iki Ada* memotong dan memblokir akses maritim Turki. Para pencetus *Mavi Vatan* menyoroti bahwa *On Iki Ada* tidak seharusnya memiliki ZEE nya masing-masing dengan klaim penuh sejauh 200 mil. Disusul dengan munculnya narasi bahwa pulau-pulau tersebut seharusnya berada dalam satu klaim dengan Anatolia (Denizeau 2021). Selain itu, Turki merasa terancam dengan kehadiran pulau-pulau tersebut, mengingat jarak dari *On Iki Ada* dekat dengan Turki dibandingkan dengan Yunani (TRT Haber 2021). Contohnya, Pulau Kastellorizo atau Pulau Meis yang hanya berjarak 10 kilometer dari Turki, justru masuk dalam klaim Yunani yang mana negara tersebut berjarak 580 kilometer dari Pulau Kastellorizo (Mianji 2020, 1).

Perpanjangan ZEE hingga ke *The Turkish Republic of Southern Cyprus* (TRNC) atau Siprus Turki juga menjadi salah satu klaim dari *Mavi Vatan*, karena hal tersebut akan membuat Turki memiliki hak atas sumber daya hidrokarbon di dalamnya dan mencegah isolasi maritim dari aliansi Yunani. (Norris and Norris 2020). Sayangnya, pada April 2004 *Greek Administration of South Cyprus* (GASC) atau Siprus Selatan secara sepihak mendeklarasikan ZEE di kawasan Mediterania Timur dengan beberapa wilayah yang rupanya tumpang tindih dengan landas kontinen milik Turki. Selain itu, Yunani juga mengumumkan ZEE nya yang dipublikasikan dalam sebuah peta oleh Universitas Seville. Peta tersebut membuat Turki khawatir karena ZEE yang diklaim oleh Yunani

dapat menutup wilayah Turki di Teluk Antalya dan mengurangi wilayah yurisdiksi Turki yang semula sejauh 189.000 km² hingga hanya tersisa sejauh 41.000 km² (Balkan and YEŞİLTAS 2023, 136).

Merespon hambatan tersebut, angkatan laut Turki di bawah kepemimpinan Laksamana Cem Gurdeniz menerapkan konsep *Mavi Vatan* atau *Blue Homeland* yang menjadikan Turki menetapkan wilayah yurisdiksi perairannya seluas 462.000 km² (Balkan and YEŞİLTAS 2023, 136). Klaim dari *Mavi Vatan* meliputi ruang maritim seluas 462.000 km² di Laut Aegea, Laut Hitam, dan Laut Mediterania Timur (Martin, n.d., 1). Klaim Turki di Laut Aegea yang didasarkan pada *Mavi Vatan* menjadi sangkalan untuk klaim Yunani terhadap *On İki Ada*. Dengan adanya *Mavi Vatan*, sebagian besar perairan di pantai-pantai yang terletak di Anatolia beserta pulau-pulaunya, masuk ke dalam klaim Turki (Denizeau 2021, 9).

Di Mediterania Timur, *Mavi Vatan* membuat klaim hingga berbatasan dengan ZEE Libya dan Mesir, dimana pada bagian ini klaim Turki tumpang tindih dengan klaim Yunani atas pulau-pulau seperti Pulau Kastellorizo, Pulau Rhodes, Pulau Kreta, dan Republik Siprus. *Mavi Vatan* memang tidak secara langsung mengklaim pulau-pulau tersebut, namun menolak klaim Yunani dengan adanya perspektif definisi ZEE yang berbeda untuk bisa berhak atas berbagai pulau tersebut (Denizeau 2021, 10).

Gambar 5. Peta Klaim *Mavi Vatan*



Sumber: (Palyatif Blog 2020)

Pencetus *Mavi Matan* beranggapan bahwa runtuhnya Kesultanan Ottoman adalah akibat dari ketidakmampuan dalam menunjukkan diri sebagai kekuatan maritim. Hal tersebut terlihat dalam Perjanjian Sevres yang hanya menyisakan wilayah 120.000 km² untuk Turki dengan garis pantai 600 kilometer di Laut Hitam. Batas wilayah tersebut menjadikan

Turki tidak memiliki akses ke Laut Aegea maupun Laut Mediterania karena Turki dianggap bukan sebagai negara yang memiliki kekuatan besar di bidang maritim (Candar 2020). Tujuan utama penerapan *Mavi Vatan* adalah untuk menjadikan Turki sebagai kekuatan maritim regional, memperkuat klaim maritim Turki, dan melawan upaya barat dalam membatasi pergerakan Turki (Jager and Norris 2021).

Mavi Vatan menyoroti pentingnya klaim atas wilayah-wilayah yang ingin dikuasai untuk status kekuatan Turki. *Mavi Vatan* juga menjelaskan bahwa adanya titik-titik strategis yang harus dikendalikan yaitu wilayah pesisir, perbatasan laut dengan Libya, Siprus, dan pulau-pulau di sekitarnya. Penerapan *Mavi Vatan* menjadikan Turki meningkatkan kekuatan militer di laut.

Militerisasi lautan yang dilandaskan dari *Mavi Vatan* mengkategorikan negara-negara di kawasan Mediterania menjadi tiga kelompok. Pertama, negara sekutu yaitu Libya dan *The Turkish Republic of Northern Cyprus* (TRNC). Libya memiliki posisi geografis yang akan membantuk menetapkan ZEE Turki agar tidak terisolasi dari aliansi Yunani dan Mesir, sedangkan TRNC berfungsi menjadi benteng untuk klaim *Mavi Vatan* di sisi selatan. Kedua, negara-negara musuh struktural yaitu Yunani dan Republik Siprus, dimana kedua negara ini jelas menjadi musuh utama dalam konflik akibat klaimnya yang menjepit ZEE Turki. Ketiga, musuh *occasional* yang terdiri dari negara-negara yang mendukung Yunani seperti Italia, Mesir, Israel, Lebanon, dan Suriah (Denizeau 2021, 13-15).

Pada masa kepemimpinan Presiden Recep Tayyip Erdogan, tepatnya pada 21 November 2019, Turki menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Libya terkait perbatasan. Tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai penerapan *Mavi Vatan*, dimana dari MoU ini menghasilkan garis diagonal yang kemudian menghubungkan pantai di timur laut Libya dengan pantai di barat daya Turki. Hal itu menjadikan Turki dan Libya memiliki perbatasan lautan. *Mavi Vatan* dilihat sebagai landasan dalam MoU tersebut karena menjadikan Turki kemudian mendapatkan wilayah maritim yang lebih luas, serta memperkuat landasan hukum Turki atas pulau-pulau kecil di sekitarnya (Dinata, Priadarsini, and Prameswari 2024, 403).

Selain melalui kesepakatan-kesepakatan, Turki juga menjadikan *Mavi Vatan* sebagai dasar tindakan militer Turki di Laut Aegea dan Laut Mediterania. Pada bulan Februari 2019, Turki melakukan latihan militer dengan 117 kapal dan jet tempur di Laut Aegea dan Laut Mediterania (Mianji 2020, 1). Masih di tahun 2019, dua kapal pengebroan milik Turki yaitu Fatih dan Yavuz, kapal survei Barbaros, yang dikawal oleh kapal perang untuk melakukan operasi di perairan Siprus.

Selanjutnya di tahun 2020, Turki mengirimkan kapal survei seismik Oruc Reis yang juga dikawal oleh lima kapal perang di zona perairan yang diklaim oleh Yunani, dimana kemudian terjadi insiden yaitu kapal perang Turki yang bertabrakan dengan kapal perang milik Yunani (SÜNNETÇİ 2019). Strategi pengiriman kapal survey yang dikawal oleh kapal perang merupakan strategi Turki untuk menunjukkan sikap tegas akan klaim maritim dan sikap superioritas Turki akan wilayah laut. Pada tahun 2025, latihan militer *Mavi Vatan* kembali dilakukan di Laut Aegea, Laut Hitam, dan Laut Mediterania Timur pada bulan Januari. Latihan militer ini disebut sebagai latihan *Mavi Vatan* terbesar karena melibatkan 90 kapal, 50 pesawat tempur, dan 20.000 personil militer (KKTC Dışişleri Bakanlığı 2025).

Mavi Vatan tidak memiliki dokumen resmi kenegaraan, dimana konsep ini bukan sebuah undang-undang resmi. Meskipun demikian, *Mavi Vatan* berstatus sebagai konsep kebijakan maritim dan politik yang dipakai oleh pemerintah Turki. Negara-negara lain turut melihat dan mengkaji peran *Mavi Vatan* dalam menjadi landasan kebijakan Turki, terutama dalam klaim maritim di era Presiden Erdogan. Institut Français des Relations Internationales (IFRI) menyebutkan bahwa *Mavi Vatan* telah menjadi doktrin nasional yang memiliki pengaruh dalam keputusan mengenai batas maritim, eksplorasi energi, serta angkatan laut Turki (Denizeau 2021, 5). Presiden Erdogan juga beberapa kali memasukkan *Mavi Vatan* dalam pidato-pidatonya, contohnya pada pidatonya saat upacara kelulusan Akademi Angkatan Laut Turki tahun 2024.

“Kami akan melindungi hak-hak kami di Tanah Air Biru, yang disebut sebagai negeri dongeng, hingga akhir. Kami tidak akan membiarkan hak-hak saudara-saudari kami warga Siprus Turki dilanggar. Di laut Aegea, Laut Hitam, dan Mediterania Timur, apapun yang dibutuhkan oleh kepentingan Turki, kami akan melaksanakannya dengan tekad dan ketegasan tanpa meminta izin dari siapapun, tanpa memperhatikan apapun yang dikatakan orang lain.” (Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı 2024).

Selain itu, Presiden Erdogan juga memberikan pidato sambutan dalam upacara peresmian operasi kapal selam Piri Reis. Dalam pidatonya Presiden Erdogan menyebutkan bahwa untuk hidup damai di tanah air, maka Turki harus memiliki angkatan laut yang kuat dan efektif baik di wilayah *Mavi Vatan* maupun di wilayah yang jauh. Turki akan mewujudkan tujuannya dan mengabaikan siapapun yang menyebut *Mavi Vatan* sebatas dongeng belaka, karena Turki akan terus bergerak untuk mencapai tujuan *Türkiye Yüzyılı* atau Abad Turki (T24 2024).

Dengan demikian, meskipun *Mavi Vatan* tidak diformalkan dalam bentuk dokumen hukum resmi negara, konsep ini tetap memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk orientasi kebijakan maritim Turki. Keberadaannya dalam wacana strategis negara, termasuk munculnya pembahasan *Mavi Vatan* dalam pidato-pidato presiden menunjukkan bahwa *Mavi Vatan* merupakan kerangka pemikiran yang memengaruhi cara Turki dalam bertindak, memandang batas maritim, dan memperjuangkan kepentingannya.

Tabel 1. Perbandingan Misak-i Milli dan Mavi Vatan

Aspek	<i>Misak-i Milli</i>	<i>Mavi Vatan</i>
Definisi	Konsep nasional Turki yang menjadi landasan gerakan nasionalis Turki setelah runtuhnya Kesultanan Ottoman (Kodal 2025).	Doktrin atau konsep maritim Turki untuk memperkuat klaim di lautan (Gürdeniz 2025).
Arti	<i>Misak</i> artinya janji, <i>Milli</i> artinya kebangsaan.	<i>Mavi</i> artinya biru, <i>Vatan</i> artinya tanah air.
Pencetus	Para nasionalis Turki yang dipimpin oleh Mustafa Kemal Pasa (United World International 2020).	Laksamana Cem Gurdeniz dan Laksamana Cihat Yayci (Gürdeniz 2025).
Periode Kemunculan	Tahun 1920.	Tahun 2006 dan berkembang pada era Presiden Erdogan.
Fokus Utama	Kedaulatan dan batas daratan Turki.	Kedaulatan dan klaim maritim Turki.
Wilayah Klaim	Anatolia, Armenia, <i>On Iki Ada</i> , Siprus, Trakia Barat, Mosul, Kirkuk, Aleppo, dan bekas-bekas wilayah kekuasaan Kesultanan Ottoman lainnya (Kodal 2025).	Laut Aegea, Laut Hitam, Laut Mediterania Timur, dan perairan sekitar Siprus dengan luas 462.000 km ² (Martin, n.d., 1).
Landasan Klaim	Historis, geografis, dan integritas demografis Turki.	Historis, geopolitik maritim, keamanan laut, dan akses sumber daya.

Korelasi dengan <i>Aegean Dispute</i> .	Menjadi dasar historis klaim Turki terhadap <i>On Iki Ada</i> (Ghazanchyan 2022).	Menolak klaim Yunani atas ZEE <i>On Iki Ada</i> (Denizeau 2021).
Bentuk Implementasi	Menjadi dasar diplomasi Turki dalam Perjanjian Lausanne.	Menjadi dasar kebijakan maritim, latihan militer, eksplorasi energi, MoU dengan Libya, dan tindakan-tindakan lain dalam <i>Aegean Dispute</i> (Dinata, Priadarsini, and Prameswari 2024).
Karakter Konsep	Nasionalisme terhadap teritorial di wilayah darat.	Neo-Ottomanisme maritim (Nursan et al. 2025, 128).
Status	Landasan historis dan ide nasional Turki.	Tidak berbentuk hukum resmi negara, tetapi berpengaruh dalam kebijakan Turki (Denizeau 2021, 5).
Korelasi <i>Misak-i Milli</i> dengan <i>Mavi Vatan</i>	Menjadi dasar historis untuk klaim Turki di masa modern.	Dipandang sebagai keberlanjutan dari <i>Misak-i Milli</i> untuk wilayah laut (GÜRDENİZ 2021).

Sumber: Diolah penulis dari Kodak (2025), Gürdeniz (2025), Denizeau (2021), Bekdul (2016), Jager dan Norris (2021), Dinata, Priadarsini, dan Prameswari (2024), serta sumber terkait lainnya

BAB 3

ANALISIS TEORI KONSTRUKTIVISME BERBASIS IDENTITAS TERHADAP PERILAKU TURKI DALAM *AEGEAN DISPUTE*

Perilaku Turki dalam *Aegean Dispute* tidak hanya dapat dipahami sebagai sengketa batas wilayah saja. Dalam perspektif konstruktivisme berbasis identitas, konflik ini juga dipengaruhi oleh konstruksi sosial, identitas, nilai ideasional, serta unsur historis yang membentuk perilaku Turki. Melalui pendekatan konstruktivisme berbasis identitas, dinamika konflik menunjukkan bahwa faktor sosial seperti makna realita dari sebuah isu, sejarah masa lalu, serta identitas memiliki pengaruh penting dalam dinamika konflik.

3.1 Konstruksi Sosial dan Fakta-Fakta Sosial (*Social Construction and Social Facts*)

Proses sosial yang terjadi antar aktor merupakan unsur yang sangat penting untuk membentuk konstruksi sosial di antara mereka. Struktur sosial yang ada berpengaruh terhadap bagaimana para aktor memandang satu sama lain. Selain itu, hal tersebut juga berpengaruh terhadap bagaimana para aktor akan melihat realita yang ada, baik dalam bentuk kesepahaman maupun perbedaan pandangan (Flockhart 2008, 83).

Pada kasus ini, konstruksi sosial yang terbentuk dari interaksi Turki dan Yunani, menjadikan Turki melihat Yunani dengan narasi ketidakpercayaan, narasi yang berlawanan, dan perbedaan pemahaman. Proses sosial antara Turki dan Yunani merupakan proses yang sangat kompleks dengan berawal dari perebutan wilayah dan berbagai ekspansi di masa lalu. Krisis dan sengketa antara kedua negara ini juga terus berulang, dimana salah satunya adalah sengketa maritim di Laut Aegea.

Berbagai krisis dan sengketa tersebut seringkali direspon langsung dengan tindakan militer. Selain itu, masing-masing pihak saling membingkai satu dengan yang lain sebagai *the Others* dan *national enemy* dengan sifat barbar, kasar, *uncivilized*, penjajah, dan sebagainya (Millas 2004, 53). Hal tersebut yang kemudian menjadikan keduanya sulit untuk membangun pemahaman bersama antar satu dengan yang lainnya, sehingga berdampak pula pada perbedaan kedua negara ini akan definisi *On Iki Ada* di Laut Aegea.

On Iki Ada selain secara wujudnya sebagai daratan yang dikelilingi air, pulau-pulau tersebut juga memiliki unsur dan nilai yang dipengaruhi dari bagaimana pihak lain melihatnya. Pandangan bagaimana para aktor melihat dan memaknai suatu objek dibedakan melalui unsur *social facts* dan *brute facts*. Dari sisi *brute fact*, *On Iki Ada* merupakan suatu objek yang wilayah keberadaannya tidak lagi diperdebatkan. Kedua negara baik Turki maupun Yunani sama-sama setuju atas eksistensi pulau-pulau tersebut di Laut Aegea. Meskipun demikian, *brute facts* tetap bergantung pada siapa yang melihat, dimana

antar aktor akan memiliki pandangan yang berbeda berdasarkan tujuan dan kepentingannya masing-masing (Flockhart 2024, 83).

Bagi Yunani, pulau-pulau tersebut telah secara resmi dan paten masuk dalam kedaulatan Yunani sehingga kepentingan negara adalah untuk mempertahankan kedaulatannya. Dari sudut pandang Turki, selain dari kacamata sejarah mengenai kepemilikan atas pulau-pulau tersebut, kepentingan Turki di Laut Mediterania juga terhambat akibat kekuasaan dan peta maritim Yunani atas *On Iki Ada*. Pulau-pulau tersebut memblokir akses Turki di lautan lepas sehingga tujuan Turki adalah menolak dan merombak peta wilayah maritim yang telah ada (Falasca 2025).

Selain *brute facts*, terdapat unsur *social facts* dimana *On Iki Ada* memiliki makna hasil dari kesepakatan antar aktor (Flockhart 2024, 83). Permasalahannya, tidak semua aktor yang terlibat di wilayah Aegea menyetujui makna atas pulau-pulau dan batas maritim di Laut Aegea. Makna akan batas wilayah yang kemudian digambarkan, salah satunya melalui Peta Seville yang merupakan hasil kesepakatan antara Yunani dan UE.

Turki memiliki pemahamannya sendiri untuk pulau-pulau dan batas maritim di Laut Aegea. Melalui *Mavi Vatan*, Turki melihat pulau-pulau milik Yunani di Laut Aegea Timur sejatinya berada di atas *continental shelf* Anatolia. Dalam sebuah artikel media Yunani, disebutkan bahwa Turki memberikan klaim terhadap pulau-pulau tersebut.

“All Greek islands of the Eastern Aegean constitute an extension of the Anatolian plate: hence, they settle on a potential Turkish continental shelf and they are not entitled to any of their own”. (Kalafikis 2022).

Selain itu, bagi Turki pulau-pulau tersebut memiliki makna sebagai pengepung dan tembok yang memblokir akses Turki ke Laut lepas. Dengan status pulau-pulau tersebut sebagai milik Yunani, Turki merasa terancam. Laksamana Cihat Yayci memberikan klaim bahwa pulau-pulau tersebut setidaknya harus ditempatkan pada status demiliterisasi. Hal tersebut didasarkan pada pemikiran jika wilayah tersebut dilegalkan senjata, maka negara yang paling rawan menjadi target tentunya adalah Turki (Denizeau 2021, 10). Turki melihat bahwa pulau-pulau tersebut adalah bagian dari *Mavi Vatan*. Dalam peta-peta yang digambar berdasarkan doktrin *Mavi Vatan*, garis maritim Turki digambarkan sangat luas dan mencakup pulau-pulau di Laut Aegea, termasuk *On Iki Ada* dengan segala ambiguitas akan statusnya (Denizeau 2021, 10).

Pandangan Turki terhadap Perjanjian Lausanne yang menjadi cikal bakal batas wilayahnya juga berbeda dengan apa yang dipahami oleh Yunani. Menurut pandangan nasionalis Turki, terutama para pencetus *Mavi Vatan*, Perjanjian Lausanne telah memperkecil wilayah Turki, meski tidak dipungkiri bahwa Perjanjian Lausanne berperan sebagai landasan lahirnya Republik Turki dengan kedaulatan yang sah. Bagi Turki, Perjanjian Lausanne dipandang sebagai sebuah hal yang kontradiktif antara kemenangan atau kesalahan besar. Pada Desember 2017, Presiden Recep Tayyip Erdogan melaksanakan

pertemuan dengan para pemimpin Yunani. Di pertemuan tersebut, Presiden Erdogan secara terus terang menyampaikan bahwa Perjanjian Lausanne perlu direvisi. Menanggapi pernyataan tersebut, pemerintah Yunani yang diwakili oleh Prokopis Pavlopoulos menyangkal dengan mengatakan bahwa Perjanjian Lausanne tidak dapat dinegosiasikan lagi karena perjanjian tersebut telah mendefinisikan wilayah Yunani dan UE (Sofuoglu 2018).

Dalam kacamata Turki sebagai konteks *social facts*, Perjanjian Lausanne merupakan suatu traktat hukum yang seolah menjadikan Turki seperti ‘diperkecil’ tanpa akses kedaulatan maritim ke lautan lepas. Hal tersebut menjadikan Turki memandang langkah kedepannya melalui doktrin *Mavi Vatan* untuk bisa memperluas kedaulatan maritimnya (Khalil 2017).

3.2 Struktur Ideasional dan Struktur Material (*Ideational and Material Structure*)

Teori konstruktivisme berpendapat bahwa struktur sosial tidak bisa dipahami jika hanya dilihat melalui struktur material saja. Hal tersebut disebabkan karena nilai-nilai dari struktur ideasional yang memberi makna terhadap tindakan yang dilakukan menggunakan struktur material tersebut (Flockhart 2008, 84-85). Maka dari itu, perilaku Turki dalam *Aegean Dispute* tidak hanya dilihat dari sisi struktur materialnya saja, namun juga dari sisi struktur ideasional yang menjadi landasan dibalikinya.

Pada tahun 2019, Turki menandatangani MoU dengan Libya dimana MoU tersebut menjadikan garis pantai Turki dan Libya menjadi terhubung. Hal tersebut menjadikan Turki memiliki status hukum yang lebih kuat untuk klaim landas kontinennya (Dinata, Priadarsini, and Prameswari 2024, 399-400). Yunani tentu menolak perjanjian tersebut, dan memperkirakan jika MoU antara Turki dan Libya terus berlaku maka Turki akan semakin ingin menguasai blok lepas pantai hingga ke Pulau Kreta yang berada di bawah teritorial Yunani (Tsakiris, n.d.). Selain itu, garis pantai hasil MoU Turki dengan Libya menjadikan Turki memiliki hak kedaulatan dan kuasa atas jalur pembangunan pipa EastMed yang akan dilakukan oleh aliansi Yunani (Falconio 2025).

Konflik dari segi material semakin nampak ketika di bulan Juli tahun 2020, Turki mengirimkan kapal riset Oruc Reis ke wilayah selatan Pulau Kastellorizo yang dikawal oleh kapal fregat Turki, Kemal Reis. Kapal Kemal Reis mengalami tabrakan dengan kapal fregat milik Yunani, Linmos, yang kemudian menjadikan konflik antara kedua negara ini semakin memanas (Anthony and Sahlin 2020). Dari segi kekuatan militer sebagai salah satu struktur material, Turki memiliki kapal perang dan kapal eksplorasi yang dikirim ke Laut Aegea. Turki juga memiliki kepentingan atas jalur pipa gas EastMed yang melewati landas kontinen Turki, dimana Turki menegaskan bahwa setiap negara yang berupaya untuk meletakkan pipa di bawah laut di wilayah landas kontinen Turki, maka harus dengan persetujuan dari Turki (Dinata, Priadarsini, and Prameswari 2024, 409).

Sengketa di Laut Aegea tidak hanya sebatas kapal tempur, perebutan daratan di tengah laut, cadangan gas, maupun kekuatan militer. Material tidak cukup untuk mendefinisikan hubungan, interaksi, atau tindakan dari pada aktor. Berkaitan dengan hal tersebut, makna dari eksistensi suatu materi dapat dilihat dari hubungan, interaksi, dan nilai ideasional yang ada di antara aktor-aktor yang terlibat. Nilai-nilai tersebut tidak selalu berbentuk kesepahaman, kerjasama, dan hal-hal yang saling sejalan, melainkan dapat berupa kecurigaan maupun permusuhan (Flockhart 2024, 84).

Ketika kita membahas mengenai struktur atau nilai ideasional, tentu tidak terlepas dari visi dan orientasi politik dari aktor yang terlibat. Ideasional dalam konteks ini adalah hal yang memengaruhi cara Turki bertindak dan memandang dunia. Secara umum, Turki di bawah kepemimpinan Presiden Erdogan menargetkan untuk menjadi salah satu sepuluh kekuatan teratas di bidang politik, ekonomi, militer, dan diplomasi. Visi politik ini disebut sebagai *Türkiye Yüzyılı* atau Abad Turki dimana Turki akan banyak meningkatkan kapasitas negaranya baik dari segi keamanan serta lembaga hubungan luar negerinya.

Turki akan memperluas hubungan diplomatiknya dengan negara-negara lain untuk meningkatkan kedudukannya di dunia internasional. Setelah kapasitas politik luar negeri Turki meningkat, negara ini memutus hubungan hierarkis dengan negara-negara barat. Turki hanya melanjutkan kemitraan dengan status yang setara. Salah satu tujuan Turki adalah meningkatkan status internasionalnya sehingga negara-negara lain akan lebih mempertimbangkan pergerakan Turki (Ataman 2023). Pada masa kepemimpinan Presiden Erdogan, Turki menggunakan narasi persatuan umat muslim dan nostalgia kejayaan Kesultanan Ottoman untuk memperkuat eksistensi Turki. (Shaikh 2024).

Turki banyak menggunakan *hard power* dalam *Aegean Dispute*, namun Presiden Erdogan menegaskan bahwa Turki tidak memiliki pemikiran untuk melakukan ekspansi atau keinginan merebut wilayah negara lain. Dominasi dan klaim yang dituju oleh Turki semata-mata hanya wilayah yang dianggap merupakan hak Turki sedari awal. Maka dari itu, Turki menyatakan bahwa kesiapannya untuk berperang berfungsi untuk mempertahankan kedaulatan dan kepentingan negara.

Dalam pidatonya, Presiden Erdogan juga menekankan bahwa Turki mengusahakan perdamaian dan kesejahteraan kawasan dengan mengaktifkan pasukan militer dan kapal-kapal fregat yang berpatroli di wilayah Mediterania Timur (TRT World Now 2021). Selain itu, bagaimana Turki melakukan tindakan *hard power* melalui elemen materialisnya juga dapat dilihat melalui *Mavi Vatan*. Salah satu tindakannya adalah dengan mengirimkan kapal ke wilayah yang tengah disengketakan dengan Yunani (Deutsche Welle (DW) 2020).

Fenomena batas maritim dan pengucilan Turki di wilayah tersebut menjadikan Turki bergerak melindungi wilayahnya supaya tidak terpecah belah seperti saat serangkaian Perjanjian Sevres dan Perjanjian Lausanne. Hal tersebut dilakukan untuk melindungi hak-hak maritimnya sebagai nilai moralitas untuk generasi Turki di masa depan (Diakopoulos et al. 2023).

3.3 Identitas, Kepentingan, dan Logika Aksi (*Identity, Interest, and Logic of Action*)

Identitas dan kepentingan menjadi suatu hal yang penting untuk mengetahui bagaimana Turki akan bertindak. Identitas adalah bagaimana aktor akan mendefinisikan siapa dirinya, posisinya di dunia internasional, dan interaksinya dengan aktor lain. Identitas dan kepentingan aktor dipengaruhi oleh sejarah, budaya, politik, dan konteks sosial aktor tersebut (Flockhart 2024, 85). Perilaku Turki dalam *Aegean Dispute* dipengaruhi oleh pemahaman negara tersebut akan identitasnya.

Penetapan visi *Türkiye Yüzyılı* sebagai arah politik luar negeri Turki didasari juga oleh unsur identitas dan kepentingan sebagai sebuah negara. Pengaruh dari unsur tersebut kemudian menjadi *rational background* atas visi *Türkiye Yüzyılı*. Turki tumbuh sebagai penerus dari Kesultanan Ottoman, terlepas dari perpecahan wilayah Turki setelah Perjanjian Sevres dan Perjanjian Lausanne. Identitas Turki ini kemudian semakin menguat dengan adanya ‘luka’ dari Perjanjian Lausanne yang dianggap memperkecil wilayah Turki, yang kemudian Presiden Erdogan menekankan narasi ideologi Neo-Ottomanisme.

Ideologi Neo-Ottomanisme menjadi pilar penting politik luar negeri Turki di bawah Presiden Erdogan. Turki memposisikan diri dan berambisi untuk menjadi pemimpin dunia Islam modern yang demokratis, sekuler, dan kuat dengan sistem ekonomi kapitalis. Ideologi ini didasarkan pada memori sejarah kejayaan Kesultanan Ottoman yang disegani di kawasan Eropa pada masa lalu, sehingga Turki banyak

melakukan penyebaran pengaruh di wilayah-wilayah bekas Kesultanan Ottoman (Taufiq 2020). Selain itu, ideologi Neo-Ottomanisme juga mendorong Turki untuk mengklaim wilayah perairan yang bertujuan mengembalikan konstruksi jati diri Turki sebagai dominasi kekuatan maritim.

Selain tujuan untuk nilai material seperti kekuasaan terhadap wilayah maritim dan sumber daya energi, kepentingan Turki dalam *Aegean Dispute* juga berkaitan dengan upaya mempertahankan identitas nasional warisan dari Kesultanan Ottoman. Tidak dapat dipungkiri, Turki juga memiliki kepentingan atas sumber daya di Laut Aegea, dan kepentingan untuk meningkatkan kekuatannya. Tetapi, jika kita melihat melalui perspektif konstruktivisme berbasis identitas, kepentingan Turki terkonstruksi melalui pengalaman historis dan cara Turki mendefinisikan dirinya. Memori kehilangan wilayah setelah Perjanjian Lausanne menjadikan Turki memiliki persepsi bahwa ruang geraknya dibatasi oleh bangsa barat. Kondisi tersebut kemudian melahirkan kepentingan untuk mengembalikan kembali kekuatan dan pengaruh Turki, terutama di kawasan Laut Aegea.

Logic of Action Turki kemudian terbentuk dari konstruksi tersebut dan menjadi legitimasi bagi tindakan Turki yang lebih agresif, konfrontatif, dan tegas terhadap sikap Yunani. Landasan rasional akan ambisi Turki untuk berkuasa di kawasan Mediterania juga dapat dilihat dari kepentingan nasional pada aspek SDA. Kepentingan, ideologi, identitas, serta ambisi yang menjadi landasan visi politik luar negeri Turki kemudian menjadi *logic of action*. Contohnya ada pada

tindakan-tindakan Turki dalam sengketa dengan Yunani di Laut Aegea, seperti pengiriman kapal pengeboran, NAVTEX dari tahun 2020, penandatanganan MoU delimitasi dengan Libya, serta penolakan klaim maritim Yunani (Kabalan 2020).

Klaim perairan tersebut dimanifestasikan dalam doktrin *Mavi Vatan*, dimana melalui Laksamana Cem Gurdeniz, disebutkan bahwa *Mavi Vatan* adalah *Misak-i Milli* yang baru, yang melampaui ideologi *revisionist realism* dari Mustafa Kemal Pasa (Denizeau 2021, 16). *Mavi Vatan* terbukti menjadikan Turki melakukan tindakan-tindakan yang menegaskan posisi serta klaimnya akan perairan Aegea. Dengan memperkuat citra Turki sebagai aktor yang dominan, Turki juga menolak tindak pengucilan oleh aliansi Yunani. Upaya-upaya Turki tersebut membuahkan hasil yang cukup signifikan dimana beberapa pihak mulai mengeluarkan *statement* bahwa Turki adalah negara kuat yang perlu dipertimbangkan eksistensinya (Latief 2021). Dengan kata lain, *Logic of Action* Turki muncul dari konstruksi keyakinan akan identitas negara, serta kemudian menjadi legitimasi atas berbagai tindakan Turki dalam *Aegean Dispute*.

3.4 Agen, Struktur, dan Praktik (*Agents, Structure, and Practice*)

Agen atau aktor dan struktur sosial merupakan sebuah kesatuan yang saling membentuk dan memengaruhi. Tindakan aktor dipengaruhi oleh struktur sosial yang ada, tetapi juga bisa mengubah keadaan struktur sosial (Flockhart 2008, 89). Maka dari itu, analisis dari indikator akan menunjukkan bagaimana komponen-komponen tersebut akan dipengaruhi dan memengaruhi Turki sebagai aktor ketika bertindak.

Dalam kasus ini, Turki menjadi agen atau aktor yang bertindak. Tindakan Turki dipengaruhi oleh struktur sosial yang ada antara kedua negara tersebut. Struktur sosial itu terbentuk dari hasil interaksi mereka sejak masa lalu sehingga yang ada saat ini berupa permusuhan, perbedaan pendapat, kecurigaan antar negara, dan berbagai pandangan buruk lainnya. Hal tersebut yang kemudian menjadikan *practice* yang dilakukan oleh Turki adalah tindakan-tindakan agresif.

Jauh sebelum tahun 2019, Turki dan Yunani telah mengalami banyak konflik. Kondisi antar kedua negara ini dinyatakan berbahaya selama struktur yang ada adalah ambisi untuk mengadu kekuatan. Dalam sejarah, kondisi tersebut dapat membawa Turki dan Yunani ke medan perang setidaknya sebanyak empat kali sejak tahun 1970-an. Selama bertahun-tahun, Turki dan Yunani berada dalam kondisi stagnan, tidak ada kesepakatan, pembahasan, dan justru memunculkan sengketa yang semakin berkembang (International Crisis Group 2021, i-ii). Sejarah panjang antar kedua negara ini menjadikan keduanya memiliki pandangan yang berbeda atas Laut Aegea dan pulau-pulaunya.

Sejarah membentuk sudut pandang Turki masa kini dalam melihat Laut Aegea sebagai hak historis sebelum Turki kehilangan wilayahnya dalam perjanjian-perjanjian setelah Perang Dunia I (Denizeau 2021, 9). Tindakan Turki dalam konflik di Laut Aegea didasari dari nasionalisme yang didorong memori hilangnya wilayah Turki sehingga membuat Turki bertindak cukup agresif. Dalam *Aegean Dispute* ini, struktur sosial antara Turki dan Yunani menjadikan Turki mengalami dua frustrasi utama yang memengaruhi agresifitasnya di Laut Aegea. Pertama, Turki dan TRNC dikecualikan dari peluang potensi energi dan pembangunan pipa EastMed. Kedua, banyak kebijakan negara-negara sekitar yang mengikis kedaulatan keamanan ekonomi dan keamanan geopolitik Turki (International Crisis Group 2021, 9). Faktor-faktor tersebut yang kemudian membuat Turki terdesak dan bertindak dengan agresif untuk mempertahankan posisinya.

Tindakan Turki dalam konflik ini banyak dipengaruhi dan dilandaskan pada *Mavi Vatan* sebagai salah satu wujud ambisi Turki untuk berkuasa di wilayah maritim. Praktik yang dilakukan oleh Turki mencakup tindakan diplomatik, militer, dan eksplorasi sumber daya. Setelah menandatangani MoU batas maritim dengan Libya di tahun 2019, Turki melanjutkan tindakan politiknya di Laut Aegea dengan tindakan militer. Pada awal Mei tahun 2020, pesawat tempur Turki terbang di atas Pulau Inousses, Yunani, dengan misi unjuk kekuatan. Yunani melihat hal tersebut sebagai tindakan provokatif. Satu tahun sebelumnya, tepatnya pada bulan Maret dan Mei, angkatan laut Turki mengadakan latihan *Mavi Vatan* di Laut Aegea, Laut Hitam, dan Laut

Mediterrania Timur. Latihan ini melibatkan sekitar seratus unit kapal Turki (Peyronnet 2020).

Turki juga melakukan tindakan-tindakan NAVTEX, dimana yang terbaru terjadi pada September 2025. Turki mengeluarkan peringatan navigasi atau NAVTEX kepada Yunani. Ketegangan muncul setelah Turki mengumumkan pengiriman kapal survei Piri Reis di Laut Aegea. Yunani menanggapi hal tersebut dengan tindakan militer yaitu pengerahan pasukan udara, darat, dan laut untuk melakukan latihan militer dengan alibi pencegahan atas hal-hal yang tidak diinginkan. Saat latihan militer tersebut berlangsung, Turki terus menerus mengeluarkan sinyal NAVTEX untuk menegaskan klaimnya atas beberapa pulau di Laut Aegea. Dengan klaim tersebut, pulau-pulau itu berarti harus tetap dengan status demiliterisasi sesuai dengan perjanjian internasional (Turkish Minute 2025).

Kapal-kapal yang dikirim Turki sebagai simbol penegasan klaim juga turut memengaruhi situasi konflik, terlebih ketika kapal-kapal tersebut mengalami tabrakan dengan kapal milik Yunani. Pada bulan Maret 2020, terjadi tabrakan ringan antara kapal penjaga pantai milik Turki dan Yunani di dekat Pulau Kardak. Tidak kurang dari tujuh bulan setelahnya, di bulan Agustus, kapal Linmos milik Yunani bertabrakan dengan kapal Kemal Reis. Di tahun 2021, tabrakan kedua antar kapal penjaga milik masing-masing negara kembali terjadi di Pulau Kardak. Kedua negara sama-sama membela diri, dimana Yunani merasa wilayahnya terganggu dengan kehadiran Turki. Di sisi lain, Turki merasa memiliki hak atas Pulau Kardak sehingga mengusir kapal-kapal Yunani

yang dianggap melanggar batas wilayah (Widodo 2021).

Struktur sosial dengan landasan kecurigaan dan rivalitas yang telah mengakar sejak masa lalu membuat kedua negara ini bersifat sangat defensif. Selain melakukan berbagai aksi, Turki juga mengeluarkan ancaman bagi Yunani karena Yunani terus menerus mempersenjatai pulau-pulau di Laut Aegea. Menurut Turki, pulau-pulau tersebut harus tetap dalam status non-militer sesuai dengan perjanjian internasional (Amala 2022).

Hal-hal yang dilakukan Turki memengaruhi kondisi sosial antara Turki dan Yunani. Satu tindakan militer memunculkan tindakan balasan. Kecurigaan dan rivalitas terus tumbuh di antara kedua negara ini. Perdana Menteri Yunani, Kyriakos Mitsotakis, membuat keputusan untuk memperkuat militer Yunani, dengan dilandaskan oleh kecurigaan terhadap apa yang akan dilakukan oleh Turki di waktu-waktu mendatang (International Crisis Group 2021, 18). Turki meningkatkan kehadiran angkatan lautnya di Laut Aegea. Kapal-kapal perang yang saling mengawasi, serta pesawat-pesawat tempur yang mengintai dari batas udara membuka kemungkinan besar akan terjadinya insiden tabrakan, dimana hal tersebut dapat menjadi faktor yang memperburuk kondisi antar kedua negara (International Crisis Group 2021, 28).

Aktor atau pihak ketiga seperti UE mulai masuk dalam lingkup interaksi Turki dan Yunani. Masuknya pihak ketiga dalam sengketa ini juga dipengaruhi dan memengaruhi kondisi di antara kedua negara yang tengah berkonflik. UE hadir disebabkan karena agresifitas Turki yang dianggap membahayakan kedaulatan Yunani, sehingga UE menunjukkan

solidaritas untuk anggotanya. Selanjutnya, UE memberikan ancaman dan sanksi atas tindakan Turki. Kondisi dimana Turki mendapatkan sanksi, dan Yunani mendapatkan dukungan, menjadikan adanya perubahan dalam situasi yang dihadapi oleh Turki(Permana 2020).

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Sengketa maritim antara Turki dan Yunani merupakan konflik yang sangat kompleks karena dipengaruhi oleh berbagai faktor di dalamnya. Letak strategis Laut Aegea dengan berbagai sumber daya di dalamnya, serta faktor struktur sosial menjadikan konflik antar kedua negara ini berlangsung lama. Konstruksi wacana Turki terhadap Laut Aegea dibentuk oleh konstruksi historis dan ideologis yang muncul pada awal pembentukan Republik Turki.

Konsep *Misak-i Milli* menjadi landasan awal dalam membangun imajinasi batas nasional Turki. Selanjutnya, gagasan *Misak-i Milli* diperluas cakupannya hingga ke wilayah laut melalui *Mavi Vatan*. Meskipun *Mavi Vatan* tidak memiliki dokumen resmi pemerintahan, namun *Mavi Vatan* berperan penting dalam menegaskan kedaulatan Turki di laut dengan tujuan memperkuat posisi geopolitik Turki, melindungi kepentingan strategis negara, dan menolak isolasi politik dari kubu Yunani.

Interaksi historis antara Turki dan Yunani membentuk konstruksi sosial yang banyak berisi kecurigaan dan narasi permusuhan. Konflik dan peperangan yang terjadi berulang kali menjadi hal konkrit yang memperkuat konstruksi negatif antar kedua negara tersebut. Dalam analisis mengenai konflik ini, konsep *brute facts* menunjukkan bahwa kedua negara mengakui eksistensi dari wilayah yang disengketakan meski maknanya berbeda. Perbedaan makna tersebut yang kemudian terhubung juga pada *social facts* yang mana makna dari wilayah yang disengketakan itu terbentuk dari interpretasi masing-masing pihak.

Konflik antara Turki dan Yunani juga dapat dilihat melalui struktur material dan struktur ideasional. Konflik memanas ketika Turki menggunakan kekuatan materialisnya seperti kapal riset yang dikawal oleh kapal perang untuk melakukan eksplorasi di wilayah sengketa. Struktur ideasional dalam hal ini adalah visi geopolitik Turki juga memengaruhi Turki dalam bertindak. Visi *Türkiye Yüzyılı* menjadi manifestasi ambisi Turki untuk menjadi kekuatan global. Identitas dan kepentingan Turki sebagai sebuah negara menjadi landasan logika bagi tindakan Turki. Ideologi tersebut kemudian mendorong Turki untuk memperluas pengaruhnya melalui klaim maritim atas wilayah-wilayah Turki yang hilang akibat Perjanjian Sevres dan Perjanjian Lausanne.

Sebagai sebuah aktor, tindakan Turki dipengaruhi oleh struktur sejarah, visi geopolitik, dan identitasnya. Di sisi lain, sebagai sebuah aktor juga, tindakan Turki akan memengaruhi struktur sosial yang ada antara dirinya dan Yunani. Memori historis mendorong Turki untuk bersikap agresif, terutama akibat dua frustrasi utama yaitu pengecualian Turki dan TRNC dari proyek pipa EastMed, dan kebijakan negara-negara sekitar yang dianggap mengancam keamanan geopolitik dan ekonomi Turki. Agresifitas Turki menjadikan pihak ketiga turut masuk dalam lingkaran sengketa. UE menunjukkan dukungan untuk Yunani dan tekanan kepada Turki. Hal tersebut menjadikan posisi Turki menjadi terdesak dan menuntut UE untuk bersikap lebih netral selayaknya pihak ketiga yang akan melakukan mediasi.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian mengenai konstruksi identitas dan kepentingan dalam konflik Turki dan Yunani di Laut Aegea, terdapat beberapa rekomendasi bagi peneliti selanjutnya. Pertama, peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan teori atau konsep lain seperti konsep *moral realism*, guna memperoleh analisis dari perspektif lain mengenai konflik ini. Kedua, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan aktor, misalnya dengan memasukkan perspektif UE dan NATO. Ketiga, penelitian selanjutnya bisa melihat dari sisi dinamika eksplorasi energi seperti pembangunan pipa EastMed.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnantopoulos, Apostolos. n.d. "The Europeanization of National Foreign Policy: The Case of Greece." Accessed March 1, 2026. https://www.academia.edu/20403869/The_Europeanization_of_National_Foreign_Policy_The_Case_of_Greece?sm=b&rhid=38135627572.
- Amala, Zarah. 2022. "Turki Ancam Yunani Karena Persenjataan Pulau-Pulau Aegean." *ARRAHMAH*, December 7, 2022. <https://www.arrymah.id/turki-ancam-yunani-karena-persenjataan-pulau-pulau-aegean>.
- Anthony, Ian, and Ambassador M. Sahlin. 2020. "Maritime disputes in the eastern Mediterranean: Why and why now?" *Stockholm International Peace Research Institute*, (October). <https://www.sipri.org/commentary/essay/2020/maritime-disputes-eastern-mediterranean-why-and-why-now>.
- Ataman, Muhittin. 2023. "The Century of Türkiye: A New Foreign Policy Vision for Building the Türkiye Axis." *Insight Turkey* 25, no. 3 (October): 73-96. 10.25253/99.2023253.6.
- Avar, Yusuf, and Yu C. Lin. 2019. "Aegean Disputes Between Turkey and Greece: Turkish and Greek Claims and Motivations in the Framework of Legal and Political Perspectives." *International Journal of Politics and Security* 1, no. 1 (May). <https://dergipark.org.tr/en/pub/ijps/article/530234>.
- Aydin, Mustafa, and Kostas Ifantis. 2004. *Turkish-Greek Relations: The Security Dilemma in the Aegean*. Edited by Mustafa Aydin and Kostas Ifantis. N.p.: Taylor & Francis.
- Balestrieri, Steve. 2026. "Why Does Greece Have So Many Air Force Fighter Planes (More than France or the UK)?" *19FortyFive*, February 1, 2026. <https://www.19fortyfive.com/2026/01/why-does-greece-have-so-many-fighter-aircraft-more-than-france-or-uk/>.
- Balkan, Serkan, and Murat YEŞİLTAS. 2023. "From Geopolitical Anxiety to Assertive Stance." *Insight Turkey* 25 (Summer). <https://www.jstor.org/stable/10.2307/48744764>.
- Bekdul, Burak. 2016. "The borders set by the Turkey's National Contract include Cyprus, Aleppo, Mosul, Batumi..." — Erdogan." *Horizon Weekly*, November 04, 2016. <https://horizonweekly.ca/en/95060-2/>.
- Candar, Cengiz. 2020. "Turkey's Blue Homeland Doctrine: Signaling Perpetual Conflict in the Mediterranean and Rough Waters Ahead." *The Türkiye Analyst*. <https://www.turkeyanalyst.org/publications/turkey-analyst-articles/item/648>.
- Defence Turkey Magazine. 2020. "TWO SIDES OF THE AEGEAN MILITARY BALANCE OF TURKISH & GREEK AIR FORCES IN THE REGION." Defence Turkey Magazine.

- <https://defenceturkey.com/en/content/two-sides-of-the-aegean-military-balance-of-turkish-greek-air-forces-in-the-region-4236>.
- Denizeau, Aurélien. 2021. "Mavi Vatan, the "Blue Homeland" c The Origins, Influences and Limits of an Ambitious Doctrine for Turkey." *Institut Français des Relations Internationales*, (April), 9-10.
- Deutsche Welle (DW). 2020. "Ambisi Maritim Turki di Laut Tengah Picu Ketegangan Ambisi Maritim Turki di Laut Tengah Picu Ketegangan dengan Eropa." *Detik News*, August 25, 2020.
<https://news.detik.com/dw/d-5145712/ambisi-maritim-turki-di-laut-tengah-picu-ketegangan-dengan-eropa>.
- Diakopoulos, Alexandros, Petros Liakouras, Kostas Ifantis, and Constantinos Filis. 2023. "Behind Turkey's 'Blue Homeland' doctrine – EKATHIMERINI." *Ekathimerini*, June 21, 2023.
<https://www.observatoireturquie.fr/behind-turkeys-blue-homeland-doctrine-ekathimerini/>.
- Dinata, Made M., Ni Wayan R. Priadarsini, and Anak Agung A. Prameswari. 2024. "Analisis Kebijakan Turki Dalam MoU Delimitasi Batas Maritim Dengan Libya Tahun 2019." *Jurnal Diskusi Ilmiah Komunitas Hubungan Internasional* 3 (January).
- Dunne, Tim. 2024. *Foreign Policy: Theories, Actors, Cases*. Edited by Steve Smith, Amelia Hadfield, Tim Dunne, and Nicholas Kitchen. N.p.: Oxford University Press.
- Ersoz, Bogum D. 2022. "Turkey-Greece Tensions Could Disrupt NATO Unity, Experts Warn." *VOA*, September 10, 2022.
<https://www.voanews.com/a/turkey-greece-tensions-could-disrupt-nato-unity-experts-warn/6739413.html>.
- Fadhil, Haris. 2026. "Tambah Lagi Negara Saling Konflik, Kini Turki Vs Yunani." *Detik News*, February 5, 2026.
<https://news.detik.com/internasional/d-8341298/tambah-lagi-negara-saling-konflik-kini-turki-vs-yunani>.
- Falasca, Piercamillo. 2025. "Tensions in the Aegean: Ankara challenges Athens with an alternative maritime map." *L'Europeista*, June 17, 2025.
<https://www.leuropeista.it/en/tensions-aegean-ankara-challenges-athens-alternative-maritime-map/>.
- Falconio, Paolo. 2025. "The Return of the Ottoman Dream: Turkey's Blue Homeland. Italy's Decline." *Notizie Geopolitiche*, November 23, 2025.
<https://www.notiziegeopolitiche.net/the-return-of-the-ottoman-dream-turkeys-blue-homeland-italys-decline/>.
- Flockhart, Trine. 2008. "Constructivism and Foreign Policy." In *Foreign Policy: Theories, Actors, Cases*, 80-90. N.p.: Oxford University Press.
- Ghazanchyan, Siranush. 2022. "Turkish map shows Greek Islands, Crete belonging to Turkey." *Radio of Armenia*, July 11, 2022.
<https://en.armradio.am/2022/07/11/turkish-map-shows-greek-islands-crete->

- belonging-to-turkey/.
- Greece High Definition. 2025. "The Territorial Evolution of Modern Greece: From 1832 to Today." Greece High Definition.
<https://www.greecehighdefinition.com/blog/2025/1/12/the-territorial-evolution-of-modern-greece-from-1832-to-today>.
- GÜRDENİZ, CEM. 2021. "Mavi Vatan'ı sahiplenmek - Cem GÜRDENİZ." *Cumhuriyet*, September 22, 2021.
<https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/olaylar-ve-gorusler/mavi-vatan-i-sahiplenmek-cem-gurdeniz-1870813>.
- Gürdeniz, Cem. 2025. "Mavi Vatan'dan Açık Denizlere." Mavi Vatan Substack.
<https://mavivatan.substack.com/p/mavi-vatandan-ack-denizlere>.
- Hellenic Republic Ministry of Foreign Affairs. n.d. "EU Maritime Security Strategy." Hellenic Republic Ministry of Foreign Affairs. Accessed March 1, 2026.
<https://www.mfa.gr/en/foreign-policy/greece-in-the-eu/eu-maritime-security-strategy/>.
- Hellenic Republic Prime Minister. 2020. "Signing Ceremony of the Interstate Agreement for the construction of the EastMed gas pipeline." Hellenic Republic Prime Minister. <https://www.primeminister.gr/en/2020/01/02/23049>.
- Inonu Vakfı. n.d. "Today in History-28 January 1920." Inonu Vakfı. Accessed December 17, 2025.
<https://www.ismetinonu.org.tr/en/today-in-history-28-january/>.
- International Crisis Group. 2021. "Turkey-Greece: From Maritime Brinkmanship to Dialogue." *International Crisis Group*, (May). International Crisis Group.
- Jager, Jeff, and Andrew Norris. 2021. "The Mavi Vatan Doctrine and Blue Homeland Anthem: A Look At Turkey's Maritime Worldview." Center for International Maritime Security.
<https://cimsec.org/the-mavi-vatan-doctrine-and-blue-homeland-anthem-a-look-at-turkeys-maritime-worldview/>.
- Jovanovski, Dalibor. n.d. "THE SPEECH OF IOANNIS KOLETTIS AND THE EMERGENCE OF THE GREEK "GREAT IDEA."" 92-93. Accessed December 23, 2025.
https://www.academia.edu/102570406/THE_SPEECH_OF_IOANNIS_KOLETTIS_AND_THE_EMERGENCE_OF_THE_GREEK_GREAT_IDEA.
- Kabalan, Marwan. 2020. "Turkey's foreign policy and the myth of neo-Ottomanism." *Al-Jazeera*, August 5, 2020.
<https://www.aljazeera.com/opinions/2020/8/5/turkeys-foreign-policy-a>

- nd-t he-myth-of-neo-ottomanism.
- Kalafikis, Georgias. 2022. "The Aegean dispute and the Turkish strategic doctrine of the "Mavi Vatan."" *Flight*, October 19, 2022. <https://flight.com.gr/the-aegean-dispute-and-the-turkish-strategic-doctrine-of-the-mavi-vatan/>.
- Karagiannis, Dr. Emmanuel. 2020. "Mitsotakis: "Greece does not discuss sovereignty issues with Turkey."" The Begin-Sadat Center for Strategic Studies Bar-Ilan University. <https://besacenter.org/greece-turkey-deterrence/>.
- Keyman, E. F. 2017. "A New Turkish Foreign Policy: Towards Proactive "Moral Realism."" *Insight Turkey* 19, no. 1 (January): 55-69. <https://www.insightturkey.com/articles/a-new-turkish-foreign-policy-towards-proactive-moral-realism>.
- Khalil, Shatha. 2017. "Can Turkey renovate its empire by the end of the Treaty of Lausanne 2023...." *Rawabet Centre for Research and Strategic Studies*, June 18, 2017. <https://rawabetcenter.com/en/?p=2571>.
- KKTC Dışişleri Bakanlığı. 2025. "Türkiye MSB'den Mavi Vatan-2025 Tatbikatı açıklaması." KKTC Dışişleri Bakanlığı. <https://pio.mfa.gov.ct.tr/turkiye-msbden-mavi-vatan-2025-tatbikati-aciklamasi/>.
- Kodal, Tahir. 2025. "Atatürk Ansiklopedisi." Atatürk Ansiklopedisi. <https://ataturkansiklopedisi.gov.tr/detay/1225/Misak-%C4%B1-Mill%C3%AE>.
- Latief, Muhammad N. 2021. "Turki tidak dapat dikecualikan dari Mediterania Timur." *AA*, February 28, 2021. <https://www.aa.com.tr/id/dunia/turki-tidak-dapat-dikecualikan-dari-mediterania-timur/2159845>.
- Latif, Dilek, and Nusret S. Evcan. 2022. "Reconsidering 'UE Actorness' in Changing Geopolitics of the Eastern Mediterranean Region." *Insight Turkey* 24 (Fall).
- Mango, Andrew. 1987. "Greece and Turkey: Unfriendly Allies." *The Royal Institute of International Affairs* 43 (August). <https://www.jstor.org/stable/40395947>.
- Martin, Lucas. n.d. "Mavi Vatam': the Turkish 'blue homeland' doctrine." *Universidad de Navarra*, 1. Accessed January 24, 2026. <https://en.unav.edu/en/web/global-affairs/detalle/-/blogs/-mavi-vatam-la-doctrina-turca-de-la-patria-azul-3>.
- Mianji, Jaleddin N. 2020. "The Blue Homeland Doctrine of Turkey." *Institute for Political and International Studies*, (November). <https://www.ipis.ir/en/subjectview/619031/the-blue-homeland-doctrine-of-turkey>.
- Millas, Hercules. 2004. "National Perception of the 'Other' and the Persistence of Some Images." In *TURKISH-GREEK RELATIONS The Security Dilemma in the Aegean*, 53. London, Great Britain: Routledge. Taylor

- & Francis Group.
- Ministry of Foreign Affairs Hellenic Republic. n.d. "Strategic Plan." Ministry of Foreign Affairs Hellenic Republic. Accessed March 1, 2026. <https://www.mfa.gr/en/strategic-plan/>.
- Monioudi-Gavala, Dora. 2019. "Rebuilding Greece, 1830-1920. Ambitions and Realities." *Advances In Historical Studies* 8 (December): 1. <https://doi.org/10.4236/ahs.2019.85015>.
- NATO. n.d. "The North Atlantic Treaty." NATO. Accessed March 1, 2026. <https://www.nato.int/en/about-us/official-texts-and-resources/official-texts/1949/04/04/the-north-atlantic-treaty>.
- Neo Kosmos. 2025. "Mitsotakis: "Greece does not discuss sovereignty issues with Turkey."” *Neo Kosmos*, July 24, 2025. <https://neoskopos.com/en/2025/07/24/news/greece/mitsotakis-greece-does-not-discuss-sovereignty-issues-with-turkey/>.
- Ningsih, Widya L. 2025. "Perjanjian Sevres, Perjanjian Damai Turki dan Sekutu Usai Perang Dunia I
Sumber:
<https://www.kompas.com/stori/read/2025/02/02/200000479/perjanjian-sevres-perjanjian-damai-turki-dan-sekutu-usai-perang-dunia-i?page=2>.
Membership: <https://kmp.im/plus6> Downloa.” *Kompas*, February 02, 2025.
<https://www.kompas.com/stori/read/2025/02/02/200000479/perjanjian-sevres-perjanjian-damai-turki-dan-sekutu-usai-perang-dunia-i?page=2>.
- Norris, Andrew, and Alexander Norris. 2020. "Turkey's "Mavi Vatan" Strategy and Rising Insecurity in the Eastern Mediterranean." Center for International Maritime Security. <https://cimsec.org/turkeys-mavi-vatan-strategy-and-rising-insecurity-in-the-eastern-mediterranean/>.
- Nursan, Ukik A., Reno Triambodo, Tarsisius Susilo, and Thomas H. Sinaga. 2025. "ERDOĞAN DAN KONVERGENSI SUMBER DAYA GEOSTRATEGIS TURKI: PELAJARAN BAGI INDONESIA SEBAGAI POROS MARITIM DUNIA.” *HUMANITIS: Jurnal Humaniora, Sosial dan Bisnis* 3 (September): 128-129.
- "Of This Great Idea." 2007. In *National Romanticism: The Formation of National Movements*, edited by Balázs Trencsényi and Michal Kopeček, 224-248. 2007th ed. Vol. 2. N.p.: Central European University Press.
- Permana, Rakhmad H. 2020. "Buntut Ketegangan dengan Yunani, Pemimpin Eropa Dukung SaBuntut Ketegangan dengan Yunani, Pemimpin Eropa Dukung Sanksi untuk Turki.” *Detik News*, September 11, 2020. <https://news.detik.com/internasional/d-5168620/buntut-ketegangan-dengan-yunani-pemimpin-eropa-dukung-sanksi-untuk-turki>.
- Perot, Elie. 2021. "Solidarity and deterrence in the Eastern Mediterranean.” *Fondation pour la Recherche Strategique*, (June), 1-2. <https://frstrategie.org/en/publications/recherches-et-documents/solidarit>

- y-a nd-deterrence-eastern-mediterranean-2021.
- Peyronnet, Arnaud. 2020. "Turkish ambitions in the Mediterranean: towards an acceleration of naval frictions with Europe?" Fondation Méditerranéenne d'Études Stratégiques.
<https://fmes-france.org/turkish-ambitions-in-the-mediterranean-towards-an-acceleration-of-naval-frictions-with-europe/>.
- Regano, Emanuel B. n.d. "The Development of the Megali Idea through the History of Greece." *National and Kapodistrian University of Athens*, 2-3. Accessed November 26, 2025.
https://www.academia.edu/39872527/The_Development_of_the_Megali_Idea_through_the_History_of_Greece.
- Rosyidin, Mohamad. 2020. *Teori Hubungan Internasional: Dari Perspektif Klasik Sampai Non-Barat*. 1st ed. Indonesia: PT Rajagrafindo Persada.
- Rumelli, Bahar. 2004. "The European Union's Impact on the Greek-Turkish Conflict." *EU Border Conflict*, no. 6 (January), 18-20.
- Sayfa, Yeni. n.d. "British Opinion and the Turkish Foreign Policy (From Lausanne to Mosul: 1923-1926)." *Hacettepe University*, 1. Accessed December 15, 2025.
- Shaikh, Javaria. 2024. "Realist Constructivism: A Hybrid Approach Shaping Modern Power Politics." *Strategic Foresight for Asia*.
<https://strafasia.com/realist-constructivism-a-hybrid-approach-shaping-modern-power-politics/>.
- Skordos, Adamantios T. 2023. "The Greek-Turkish Population Exchange 1922/1923-Conflicted Memories and Global Legacies." *Südosteuropa-Mitteilungen*, (July), 43-44.
https://www.academia.edu/110867555/The_Greek_Turkish_Population_Exchange_1922_1923_Conflicted_Memories_and_Global_Legacies.
- Sofuoglu, Murat. 2018. "Turks still debate whether Treaty of Lausanne was fair to Turkey." *TRT World*, January 26, 2018.
<https://www.trtworld.com/article/13102666>.
- Sotirović, Vladislav B. 2018. "'Megali Idea' And Greek Irredentism In The Wars For A Greater Greece, 1912–1923." (December).
https://www.researchgate.net/publication/329483915_Megali_Idea_And_Greek_Irredentism_In_The_Wars_For_A_Greater_Greece_1912-1923.
- SÜNNETÇİ, İBRAHİM. 2019. "Gas Conflict in the Eastern Mediterranean and the Role of Turkish Naval Forces in Protecting Turkey's Sovereignty Rights." *Defence Turkey*, October, 2019.
<https://www.defenceturkey.com/en/content/gas-conflict-in-the-eastern-mediterranean-and-the-role-of-turkish-naval-forces-in-protecting-turkey-s-sovereignty-rights-3636>.
- T24. 2024. "Erdoğan: Mavi Vatan'a 'masal' diyen bedhahlara aldırmadan hedeflerimize yürüyeceğiz (Video)."

- YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=TWOLQnDbU3k>.
- Taufiq, Firmanda. 2020. "Masa Depan Politik Turki: Neo-Ottomanisme dan Sekularisme Ala Erdogan." *Islami.Co*, September 23, 2020. <https://islami.co/masa-depan-politik-turki-neo-ottomanisme-dan-sekularisme-ala-erdogan/>.
- TEMPO. 2020. "Perselisihan Turki dan Yunani Bisa Picu Konflik Militer di Mediterania Timur." *Tempo Internasional*, August 26, 2020. <https://www.tempo.co/internasional/perselisihan-turki-dan-yunani-bisa-picu-konflik-militer-di-mediterrania-timur-588384>.
- TEMPO. 2020. "Sengkarut Sengketa Turki dan Yunani di Laut Mediterania." *TEMPO*, September 1, 2020. <https://www.tempo.co/arsip/sengkarut-sengketa-turki-dan-yunani-di-laut-mediterrania-586757>.
- TRT Haber. 2021. "Mavi Vatan Belgesel (Video)." YouTube. https://youtu.be/Kuui_8LofFg?si=JoXW2mbR_9DINPbc.
- TRT World Now. 2021. "Turkey only aims to protect its rights and territory, President Erdogan says on naval exercise (Video)." YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=awAImdOx-LY>.
- Tsakiris, Theodoros. n.d. "Inflammable Waters: Turkey's Strategic Objectives in the Eastern Mediterranean and the East Med Gas Pipeline (EMGP)." *European Institute of Mediterranean*. Accessed March 1, 2026. <https://www.iemed.org/publication/inflammable-waters-turkeys-strategic-objectives-in-the-eastern-mediterranean-and-the-east-med-gas-pipeline-emgp/>.
- Turkish Minute. 2025. "Turkey issues second Navtex as Greece launches Aegean military drill." *Turkish Minute*, September 18, 2025. <https://turkishminute.com/2025/09/18/turkey-issues-second-navtex-as-greece-launches-aegean-military-drill/>.
- Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı. 2024. "“Mavi Vatan'daki haklarımızı sonuna kadar koruyacağız.”" Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı. <https://www.tccb.gov.tr/haberler/410/153431/-mavi-vatan-daki-haklarimizi-sonuna-kadar-koruyacagiz->.
- "Türkiye MSB'den Mavi Vatan-2025 Tatbikatı açıklaması." 2025. KKTC Dışişleri Bakanlığı. <https://pio.mfa.gov.ct.tr/turkiye-msbden-mavi-vatan-2025-tatbikati-aciklamasi/>.
- United World International. 2020. "The birth certificate of Turkey: Treaty of Lausanne." United World International. <https://uwidata.com/12690-the-birth-certificate-of-turkey-treaty-of-lausanne/>.
- U.S Department of State. 2022. "2022 Report on International Religious Freedom: Greece." U.S Department of State. <https://www.state.gov/reports/2022-report-on-international-religious-freedom/>.

edo m/greece.

- Widodo, Prihastomo W. 2021. "Kapal penjaga pantai Turki dan Yunani bertabrakan, Mediterania Timur kembali tegang." *Kontan.id*, January 8, 2021.
<https://newssetup.kontan.co.id/news/kapal-penjaga-pantai-turki-dan-yunani-bertabrakan-mediterania-timur-kembali-tegang>.
- Yapp, Malcolm E., and John C. Dewney. 2025. "Turkey (Türkiye) | Location, Geography, People, Economy, Culture, & History." Britannica.
<https://www.britannica.com/place/Turkey>.
- Yildiz, Edanur. 2020. "THE CONFLICT BETWEEN GREECE AND TURKEY IN THE MEDITERRANEAN SEA (INTERNATIONAL MARITIME LAW STUDY)." *JURNAL HUKUM UNISSULA* 36 (September). 10.26532/jh.v36i2.11393.
- Yoel, Grevildo A. 2023. "PERSENGKETAAN LAUT MEDITERANIA RIVLITAS TURKI YUNANI." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 6.